



**ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN BANGKA**

UNIVERSITAS TERBUKA

DISUSUN OLEH

**H. M. ESPADA YAMIN
NIM 013562761**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
JAKARTA, 2005**

UNIVERSITAS TERBUKA

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

Tesis yang berjudul “Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka” dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Pangkalpinang, September 2005

Yang menyatakan,



(H. M. ESPADA YAMIN)

NIM : 013562761

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : H. M. ESPADA YAMIN
 NIM : 013562761
 Program Studi : Manajemen Strategik
 Judul Tesis : Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka.

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Senin/26 September 2005

Waktu : 09.00 - 10.15 wib

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji

.Prof...Dr...H...Udin S. Winataputra, MA



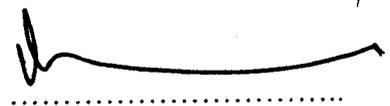
Penguji Ahli

.Prof...Dr...Dj.ohermansyah Djohan

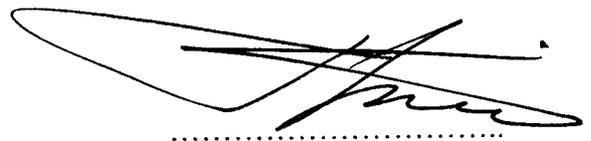


Pembimbing :

1. Drs. H. Zainul Ittihad Amin, M.Si



2. Dr. H. Surachman Dimiyati, M.Ed



KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan izin, ridho dan perkenanNya jua penelitian dengan judul “Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka (Studi Implementasi Manajemen Strategik)” ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Penelitian ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang sejauhmana prinsip-prinsip pengembangan pariwisata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangka.

Peneliti menyadari apa yang telah tersajikan dalam Tesis ini masih belum sempurna, terutama disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis dan waktu yang tersedia. Oleh sebab itu, saran perbaikan dari :

1. Pembimbing.
2. Rektor UT.
3. Direktur PPs.
4. Dekan FISIP.
5. Pemda Bangka Belitung.

semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan Tesis ini.

Peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pembimbing atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dalam penyelesaian Tesis.

Pangkalpinang, Juli 2005

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR/DIAGRAM	x
ABSTRACT	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Manajemen Strategi	8
B. Analisis SWOT dan Analisis Strategis	17
C. Pariwisata	22
D. Pajak Daerah	30

E. Administrasi Pajak Daerah	39
F. Pendapatan Asli Daerah	48
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	50
A. Metode Penelitian	50
B. Teknik Pengumpulan Data	51
C. Teknik Analisa Data	53
BAB IV : PEMBAHASAN	56
A. Temuan	56
1. Luas Wilayah dan Geografis Kabupaten Bangka	56
2. Keuangan Daerah Kabupaten Bangka	62
3. Potensi Daerah	65
4. Obyek Wisata dan Sarana Pendukung Kabupaten Bangka	77
B. Pembahasan	79
1. Strategi Yang Diterapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka Dalam Pengembangan Pariwisata	79
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Perkembangan Pariwisata Kabupaten Bangka	95
3. Besarnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD dan APBD Kabupaten Bangka.....	100

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	108
A. Kesimpulan	108
B. Rekomendasi	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	115
- Lampiran 1 : TABEL-TABEL	
- Lampiran 2 : STRUKTUR ORGANISASI DINAS	
PARIWISATA	
- Lampiran 3 : PETA KABUPATEN BANGKA	
PETA PULAU BANGKA	
- Lampiran 4 : DAFTAR PERTANYAAN	
- Lampiran 5 : TRANSKRIP WAWANCARA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bangka (lampiran)	
Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Ratio Sex dan Jumlah Rumah Tangga (lampiran)	
Tabel 4.3 : Jumlah Desa dan Dusun di Kabupaten Bangka (lampiran)	
Tabel 4.4 : Jumlah PNS, berdasarkan Golongan dan Penempatan di Kabupaten Bangka (lampiran)	
Tabel 4.5 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (lampiran)	
Tabel 4.6 : Produksi Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Bangka Tahun 2004	66
Tabel 4.7 : Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Bangka Tahun 2004	67
Tabel 4.8 : Produksi Hasil Perkebunan Kabupaten Bangka Tahun 2004	68
Tabel 4.9 : Kawasan dan Produksi KP. Timah Kabupaten Bangka Tahun 2004	70
Tabel 4.10 : Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2004	71
Tabel 4.11 : Jumlah Pelanggan PLN dan Rumah Tangga Kabupaten Bangka Tahun 2004	73
Tabel 4.12 : Komposisi Penduduk berdasarkan Usia Sekolah Kabupaten Bangka Tahun 2004	74
Tabel 4.13 : Komposisi Penduduk Usia Sekolah dan Jumlah Sekolah Tahun 2004	75

Tabel 4.14	: Jumlah Objek Wisata dan Sarana Pendukung Kabupaten Bangka Tahun 2004	77
Tabel 4.15	: Unsur-unsur Peluang-Ancaman	88
Tabel 4.16	: Kekuatan dan Kelemahan dari Lingkungan Internal Kabupaten Bangka terhadap Pesaing	90
Tabel 4.17	: Keadaan Wisatawan Kabupaten Bangka (lampiran)	
Tabel 4.18	: Pendapatan Asli Daerah	102
Tabel 4.19	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000-2004	103
Tabel 4.20	: Kontribusi Pendaptan Sektor Pariwisata Terhadap PAD dan APBD Kabupaten Bangka Tahun 2000 – 2004	106
Tabel 4.21	: Perbandingan PAD dan APBD Kabupaten Bangka Tahun 2000-2004 (lampiran)	
Tabel 4.22	: Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2000-2004 (lampiran)	
Tabel 4.23	: Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2000-2004 (lampiran)	
Tabel 4.24	: Pajak Hiburan Tahun 2004 (lampiran)	

DAFTAR GAMBAR/DIAGRAM

	Halaman
Diagram 4.1 : Jumlah Penduduk di Kabupaten Tahun 2004	59
Diagram 4.2 : Rasio sex Penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2004	59
Diagram 4.3 : Desa dan Dusun di Kabupaten Bangka Tahun 2004	61
Diagram 4.4 : Jumlah Aparatur masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2004	62
Diagram 4.5 : Realisasi PAD Tahun 2003 – 2004	63
Diagram 4.6 : Matrik Analisis SWOT	85
Diagram 4.7 : Matrik Kombinasi Peluang, Ancaman Bisnis Pariwisata	89
Diagram 4.8 : Matrik Strategi Agresif	91
Diagram 4.17 : Keadaan Wisatawan di Kabupaten Bangka Tahun 2000-2004	101

ABSTRACT

Berkembang tidaknya pembangunan sektor pariwisata memang tidak hanya terletak pada peran Pemerintah, lebih dari itu partisipasi dari semua pihak termasuk masyarakat sangat diperlukan. Namun demikian pemerintah (Pemerintah Daerah) adalah pihak yang paling berkompeten dalam arti pemerintah sebagai pihak penyelenggara pembangunan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka dalam hal ini sangat berkepentingan juga terhadap upaya pengembangan pariwisata daerah. Maka sebagai pihak yang memiliki peran *Fasilitator*, *Guiding*, serta *Supporting*, secara tidak langsung posisi atau peran yang disandang adalah cukup strategis dalam mewujudkan visi dan misi organisasinya. Manajemen strategik sebagai salah satu dari sekian banyak pendekatan manajemen, adalah merupakan pendekatan manajemen yang lebih bersifat komprehensif dalam arti memfokuskan pada analisis lingkungan secara keseluruhan seperti lingkungan internal, lingkungan eksternal serta lingkungan pihak-pihak berkepentingan lainnya (stake holder) hal ini memberikan penjelasan juga bahwa manajemen strategik sangat menyadari bahwa adaptasi dan eliminasi terhadap dinamika perubahan lingkungan adalah merupakan pentahapan penting dalam proses pencapaian tujuan organisasi.

Trend atau pertumbuhan kunjungan wisatawan selama kurun waktu tahun 2000 – 2004 untuk wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2003 dan 2004 terdapat penurunan yang disebabkan oleh situasi dan kondisi keamanan nasional yang kurang kondusif dan terjadinya pemekaran Kabupaten Bangka menjadi 4 (empat) Kabupaten yakni : Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Bangka Barat. Sehingga Kabupaten Bangka tinggal 8 (delapan) Kecamatan.

Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini dimaksudkan untuk melihat atau menentukan strategi yang perlu ditempuh Kabupaten Bangka melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka dalam melakukan pengembangan pariwisata serta melakukan suatu analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat atau pendorong untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka, yang selanjutnya digunakan analisis SWOT.

Atas dasar analisis SWOT tersebut akhirnya dapat dikemukakan beberapa hal yang dianggap strategis, seperti menciptakan iklim yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kemampuan infrastruktur dasar, melaksanakan pembangunan yang berbasis kewilayahan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan kemampuan daerah yang berbasis sektor unggulan untuk meningkatkan PAD serta pendapatan daerah, mendorong peningkatan investasi pihak swasta dan meningkatkan kinerja pemerintah dengan menerapkan prinsip *Good Governance*.

Untuk selanjutnya atas dasar beberapa hal strategik tersebut diatas agar implementasi strategis dapat berjalan baik perlu diperhatikan adanya kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak yang keberhasilannya sangat tergantung kepada kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemungutan itu sendiri sehingga dapat memberikan hasil guna (*effectiviness*), maka dalam hal kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak harus memperhatikan tahap-tahap peningkatan dalam pemungutan pajak. Untuk hasilguna yang dimaksud adalah mengukur hubungan antara lain pemungutan suatu pajak dan potensi hasil pajak tersebut harus beranggapan bahwa semua wajib pajak membayar pajak, atas pajak terhutang masing-masing wajib pajak.

Pada akhirnya pendapatan pajak hotel dan restoran, retribusi dan pajak hiburan sektor pariwisata merupakan kontribusi bagi PAD itu sendiri. Karena PAD adalah dana yang bersumber dari keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata dewasa ini menjadi sektor unggulan bagi daerah yang memiliki potensi di bidang pariwisata. Bahkan oleh beberapa daerah, sektor pariwisata dijadikan sebagai prioritas sumber pendapatan asli daerah. Salah satu daerah yang menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan asli daerah adalah Kabupaten Bangka Induk. Alasan Kabupaten Bangka Induk menjadikan pariwisata sebagai sector unggulan karena didasari oleh beberapa hal, yaitu :

1. Bahwa Bangka Induk sebagai daerah Kepulauan yang memiliki pantai indah dan panjang yakni lebih dari 1.000 km. Dengan daerah kepulauan ini, maka merupakan asset yang sangat berharga untuk pengembangan pariwisata di Bangka Induk.
2. Bahwa telah ditetapkan 8 (delapan) peruntukan tapak kawasan wisata yang telah siap untuk di kembangkan dan telah dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.
3. Bahwa telah tersedia sarana dan prasarana pariwisata seperti hotel berbintang, dan ditunjang oleh sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan jasa, walaupun masih sangat terbatas.

Selain potensi di atas, dan mengingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.580 pulau dengan luas 1.919.443 km² yang secara geografis letaknya cukup strategis karena terletak pada posisi silang dunia, yaitu antara Benua Asia dan Australia dan antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia,

ditambah dengan iklim tropis basah serta penyinaran matahari sepanjang tahun. Di samping itu Indonesia mempunyai sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya budaya (SDB) yang amat besar. Lebih dari itu, Indonesia memiliki kekayaan alam berupa sumber daya alam hayati dengan berbagai jenis flora dan fauna, serta sumber daya alam non hayati dengan banyaknya pantai-pantai dengan pasirnya yang memutih, dan menakjubkan bagi yang memandangnya seperti pantai Matras dan pantai Romodong, di Kabupaten Bangka Induk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Melihat potensi tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Induk harus dapat mengelola potensi pariwisata yang ada secara baik dan tepat. Peranan pariwisata pada dasarnya mencakup 3 (tiga) segi, yakni : (1) segi ekonomis yang merupakan hasil dan perolehan dari sumber devisa, pajak-pajak, (2) segi sosial yang dapat merangsang pencintaan lapangan kerja, dan (3) segi kebudayaan yang dapat memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan asing.

Terlebih apabila pengembangan pariwisata dapat dikelola secara tepat dan dapat mengantisipasi fenomena kepariwisataan, maka bidang ini akan tumbuh menjadi sebuah industri yang sangat menguntungkan dan mempunyai nilai sosial ekonomi yang cukup tinggi. Prospek pengembangan pariwisata juga akan berarti bagi pembangunan nasional dan pembangunan daerah, terutama dalam menaikkan pendapatan asli daerah dan penerimaan devisa negara.

Selanjutnya, berbagai usaha atau hasil kerja pemerintah dalam pembangunan pariwisata itu dapat dilihat dari data adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Misalnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

dari 57 orang pada tahun 2001 menjadi 125 orang pada tahun 2002, meningkat rata-rata 45,60% per tahun dengan lama tinggal rata-rata 10 hari. Sedangkan wisatawan Nusantara meningkat rata-rata 1,5% pertahunnya di Kabupaten Bangka. Di samping itu, sarana penunjang pariwisata juga berkembang seperti akomodasi dari hanya hampir 200 kamar pada saat tahun 1990, telah meningkat menjadi 350-an kamar pada tahun 2001/2002. Demikian pula terhadap usaha restoran dari tahun sebelumnya, terus bertambah, sejalan dengan bertambahnya usaha perjalanan wisata dan bertambah pula perjalanan wisata dengan agen perjalanan wisatanya serta adanya peningkatan industri kerajinan rakyat juga meningkat.

Dampak langsung lainnya dari pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bangka adalah berkembangnya berbagai jenis usaha wisata, jasa wisata atau sektor-sektor infrastruktur pariwisata, misalnya sektor akomodasi. Pada tahun 2002 jumlah hotel dan penginapan sebanyak 18 buah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 399 orang, dengan jumlah tamu yang menginap sebanyak 25.612 orang. Kemudian restoran dan rumah makan terus bertambah dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Selanjutnya, obyek wisata menyerap tenaga kerja yang banyak pula seperti pramuwisata dan jasa-jasa lainnya.

Peranan dan perkembangan sektor kepariwisataan sedemikian cepat karena adanya kegiatan perdagangan internasional dan naiknya income perkapita masyarakat negara maju. Tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi itulah, yang mendorong mereka melakukan perjalanan wisata ke mancanegara dan ingin mengunjungi obyek-obyek wisata di dunia termasuk ke Indonesia. Kecuali itu masih didukung lagi dengan adanya faktor bisnis internasional, yang disertai dengan faktor pelancongan (berlibur)

yang sudah menjadi gaya hidup, dan juga kualitas kehidupan yang sudah menetapkan kegiatan "*pleasure*" dalam gaya hidup masyarakat modern di negara-negara maju.

Berhubungan dengan adanya penyerahan urusan kepariwisataan sampai di Kabupaten Daerah Tingkat II ini, maka pembangunan Daerah Kabupaten Bangka semakin tidak bisa dipisahkan di daerah Kabupaten Bangka berarti juga pembangunan Bangka secara keseluruhan, apalagi sektor pembangunan pariwisata dalam prakteknya banyak mempunyai keterkaitan dengan sektor yang lain.

Berdasarkan pengamatan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara serta wisatawan Nusantara, ke pulau Bangka, maka pembangunan pariwisata berdampak positif terhadap sosial ekonomi bagi masyarakat Bangka. Dengan demikian pembangunan pariwisata dapat berperan menjadi ujung tombak masalah ketenagakerjaan, artinya pembangunan dibidang pariwisata diharapkan menyerap tenaga kerja cukup banyak.

Sebab bidang kepariwisataan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sektor-sektor lain atau mempunyai hubungan multi sektor. Misalnya, sektor perhubungan, sektor pekerjaan umum, sektor pos dan telekomunikasi, listrik dan air minum, hotel dan restoran, jasa pariwisata, dan industri-industri pendukung pariwisata, seperti industri kecil. Sektor usaha pariwisata dan industri kecil sebagai penunjang kepariwisataan kebanyakan padat karya atau banyak menggunakan tenaga kerja, sehingga dalam konteks ini, pembangunan pariwisata atau kebijaksanaan pariwisata ikut memecahkan masalah ketenagakerjaan. Pembangunan pariwisata atau

bidang kepariwisataan dapat meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat, kesejahteraan penduduk, pendapatan Asli Daerah dan pendapatan Negara.

Hal yang tersebut di atas bila dikelola dengan benar dan dengan perencanaan yang matang akan menjadi salah satu sumber andalan penerimaan/pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber penerimaan devisa negara, sebab obyek-obyek wisata itu sebenarnya berada di daerah dan setiap daerah Kabupaten/Kota sudah diberi kewenangan untuk mengelolanya. Apalagi dengan adanya otonomi daerah, yang diselenggarakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, daerah dapat secara penuh mengelola potensi daerahnya. Khususnya sektor pariwisata dalam membangun sarana pendukung kepariwisataan daerah.

Pembangunan di bidang pariwisata pada dasarnya mempunyai prospek cukup cerah. Pembangunan pariwisata merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan pembangunan di sektor-sektor lain, baik dalam skala nasional maupun regional. Pengembangan sektor kepariwisataan di suatu daerah dapat mendorong perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, devisa negara, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup dan terpeliharanya kepribadian bangsa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, memandang penting diadakannya penelitian yang mendalam mengenai sejauh mana tujuan kebijaksanaan kepariwisataan telah tercapai khususnya dampak kebijakan pariwisata terhadap peningkatan, 1. Kunjungan wisata, 2. Kesempatan kerja dan 3. Penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di samping itu akan dikemukakan pula kendala-kendala yang ada dalam upaya peningkatan pariwisata di Daerah Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Atas dasar hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan dikaji tentang :
"Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banka Induk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Strategi apa yang diterapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka dalam pengembangan pariwisata ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan pariwisata di Kabupaten Bangka?
3. Seberapa besar kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Strategi yang diterapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka dalam pengembangan pariwisata.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan pariwisata Kabupaten Bangka.
3. Besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dan APBD Kabupaten Bangka.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ::

1. Manfaat Bagi ilmu Pengetahuan

Sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik di lingkungan Civitas Akademika Universitas Terbuka (UT).

2. Manfaat Bagi Institusi

Hasil penelitian ini, merupakan nilai tambah bagi penulis untuk memperdalam strategi pengembangan kepariwisataan dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah pada umumnya atau Dinas Pariwisata pada khususnya, dalam upaya pengembangan pariwisata dan pembangunan Daerah Kabupaten Bangka.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengembangan pariwisata dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Strategi

Manajemen strategi berhubungan dengan kegiatan organisasi untuk memadukan kondisi internal dengan kondisi lingkungan usahanya untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi bersaing terbaik dalam mencapai visi organisasi yang sejalan dengan misi yang ditetapkan. Organisasi yang mempunyai suatu strategi yang tepat akan mendapatkan keunggulan bersaing terhadap para pesaingnya, oleh karena itu perumusan strategi merupakan hal yang kritis *entry* maupun kelangsungan hidup organisasi.

Setelah mempelajari dan membandingkan beberapa konsep mengenai manajemen strategi, Secakusuma (1992 : 21) membuat suatu model manajemen strategi yang pada dasarnya terdiri dari enam komponen utama, yaitu : (1) *visi/commitment*; (2) misi; (3) SWOT; (4) pilihan strategis; (5) strategi operasional serta (6) pelaksanaan dan kendali.

Misi organisasi adalah seperangkat tujuan yang mendasar dan unik yang membedakannya dengan organisasi sejenis, serta mengungkapkan ruang lingkup organisasi mengenai produk dan pasarnya. Menurut David (1995 : 12) setidaknya misi harus menjelaskan produk/jasa, konsumen, pasar, teknologi, tujuan, filosofi dan konsep diri.

Proses manajemen strategi dapat diaplikasikan baik pada organisasi besar maupun kecil, baik pada organisasi profit maupun non profit, dan baik pada organisasi swasta maupun umum. Untuk organisasi yang besar dan mempunyai beberapa divisi, Clarke-Hill dan Glaister (1991 : 10) menyatakan bahwa strategi umumnya dirumuskan dalam tiga tingkatan, yaitu : strategi korporat, strategi bisnis, strategi fungsional.

- a. Strategi korporat : menetapkan bisnis apa yang akan dilakukan oleh organisasi, menentukan tujuan jangka panjang organisasi (secara umum diklasifikasikan sebagai *growth, stability atau retrenchment*) dan mengidentifikasi langkah-langkah yang akan dilakukan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Ansoff, alternatif strategi korporat yang tergolong kedalam growth adalah: penetrasi pasar pengembangan pasar, pengembangan produk dan diversifikasi.
- b. Strategi bisnis : menekankan pada bagaimana caranya suatu unit organisasi akan berkompetisi pada bisnis yang sudah ditetapkan, menentukan pendekatan kompetitif untuk organisasi yang mempunyai produk tunggal atau strategi dari setiap unit bisnis strategi untuk organisasi dengan banyak produk.
- c. Strategi fungsional : berhubungan dengan area-area fungsional suatu bisnis, seperti produksi, pemasaran, keuangan dan lain-lain, serta lebih menekankan implementasi strategi bisnis.

Berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka dalam pembahasan temuan nanti hanya akan disinggung mengenai strategi bisnis dan strategi fungsional.

1. Pengertian Dasar Strategi

Strategi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu usaha atau bisnis. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Strategi yang berarti seni atau ilmu untuk menjadi seorang Jenderal. Strategi yang digunakan pada jaman dahulu sebagai suatu rencana untuk memenangkan perang. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, strategi berarti “Rencana cermat tentang suatu kegiatan guna meraih suatu target atau sasaran” (Salim, 1991 : 1463). Dari kedua pengertian tersebut penulis mencoba menyimpulkan mengenai pengertian strategi, yaitu :

“Sebagai suatu upaya dalam rangka mencapai target atau sasaran guna memenangkan persaingan dalam hal ini persaingan bisnis”.

Dalam perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang dimana hal tersebut dapat kita lihat dari konsep-konsep strategi berkembang saat ini, yang antara lain sebagai berikut (Rangkuti, 1997 : 3-4) :

- a) Chandler (1962) : strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.
- b) Argyris (1975), Mintzberg (1979), Steiner dan Meiner (1977) : Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.
- c) Porter (1985) : Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.

- d) Hamel dan Prahalad (1995) : Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan dimasa depan. Dengan demikian perencanaan strategis hampir selalu dimulai dari apa yang terjadi (persepsi) bukan dari apa yang dihadapkan (ekspektasi).

2. Lingkungan Eksternal dan Lingkungan Internal.

Organisasi didirikan dengan berbagai tujuan pokok : memperoleh laba, meningkatkan harga saham, meninggikan volume penjualan dan mempertahankan keberlangsungan hidupnya.

Seringkali dianggap bahwa tujuan yang pertama merupakan tujuan yang terpenting bagi pemilik, setidaknya bagi organisasi yang belum menjadi organisasi publik. Jenis tujuan yang kedua biasanya berlaku bagi organisasi yang sudah menjadi organisasi publik. Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, manajemen perlu memperhatikan dua faktor pokok, yakni faktor eksternal yang tidak terkontrol oleh organisasi dan faktor internal yang sepenuhnya berada dalam kendali organisasi. Faktor eksternal merupakan lingkungan bisnis yang melingkupi operasi organisasi dimana sering kali muncul peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) bisnis. Faktor ini mencakup lingkungan industri (*industry environment*) dan lingkungan bisnis makro (*macro environment*), ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya.

Faktor internal meliputi semua macam manajemen fungsional : pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem

informasi manajemen, dan budaya organisasi (*corporate culture*). Dari penguasaan faktor internal organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki. Dengan kata lain, organisasi akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan ketika kekuatan organisasi melebihi kelemahan yang dimiliki. Oleh karena itu organisasi tersebut mampu mengeksploitasi peluang bisnis yang ada serta memperkecil ancaman bisnis (pesaing) yang mengitarinya.

Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa tercapai tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan adalah fungsi dari lingkungan makro, lingkungan industri, manajemen fungsional dan budaya (karakter) organisasi.

3. Konsep dan Implementasi Strategi

Pada dasarnya setiap organisasi mempunyai suatu strategi dalam berusaha, hanya para pimpinan organisasi kadang-kadang tidak tahu atau tidak menyadarinya. Bentuk strategi akan berbeda-beda antar industri antar organisasi dan bahkan antar situasi yang berbeda. Dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang. Hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama tiga dekade terakhir. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

Menurut Siagian (1995 : 16) definisi strategi adalah “Strategi berarti penentuan misi pokok suatu organisasi karena manajemen puncak menyatakan secara garis besar apa yang menjadi pembenaran keberadaan organisasi, filosofi yang akan digunakan untuk manajemen keberadaan tersebut dan sasaran apa yang ingin

dicapai". Yang dimaksud dengan misi pokok pada definisi di atas adalah rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan untuk mencapai tujuan dan berbagai sasaran organisasi secara optimal. Suatu organisasi harus merupakan analisis yang tepat tentang kekuatan yang dimiliki oleh organisasi, kelemahan yang mungkin timbul dan harus dimanfaatkan serta ancaman yang diperkirakan akan dihadapi. Dengan analisis yang tepat, berbagai alternatif yang dapat ditempatkan akan terlihat.

Strategi bersaing adalah formula umum mengenai bagaimana bisnis akan bersaing, apa seharusnya yang menjadi tujuannya dan kebijakan apa yang akan diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dapat dikatakan bahwa strategi bersaing adalah kombinasi antara akhir (tujuan) yang diperjuangkan oleh organisasi dengan alat (kebijakan) sebagai landasan usaha organisasi agar dapat mencapainya. Terdapat lima kekuatan pesaing yaitu masuknya pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok serta persaingan diantara para pesaing yang ada. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa persaingan dalam suatu industri tidak hanya terbatas pada para pemain yang ada.

Jika organisasi ingin meningkatkan usahanya dalam persaingan yang semakin ketat, ia harus memilih prinsip berbisnis, yaitu produk dengan harga tinggi atau produk dengan biaya rendah, bukan kedua-duanya. Berdasarkan prinsip ini dinyatakan ada tiga strategi generik yaitu Diferensiasi, kepemimpinan Biaya Umum (*Overall Cost Leadership*), dan Fokus. Alternatif strategi dapat dikategorikan ke

dalam tiga belas tindakan dalam upaya organisasi mencapai tujuan jangka panjang yaitu ;

a. Integrasi Maju (*Forward Integration*)

Forward Integration menghendaki agar organisasi mempunyai kemampuan yang besar terhadap pengendalian para distributor atau pengecer mereka, bila perlu dengan memilikinya.

b. Integrasi Mundur (*Backward Integration*)

Backward integration merupakan suatu strategi organisasi agar pengawasan terhadap bahan baku dapat lebih ditingkatkan apabila para pemasok sudah dinilai tidak lagi menguntungkan organisasi, seperti keterlambatan dalam pengadaan bahan, kualitas bahan yang menurun, biaya yang meningkat sehingga tidak lagi dapat diandalkan. Tujuan strategi ini adalah untuk mendapatkan kepemilikan dan/atau meningkatkan pengendalian bagi para pemasok.

c. Integrasi Horizontal (*Horizontal Integration*)

Strategi Horizontal Integration menghendaki agar organisasi meningkatkan pengawasan terhadap para pesaing organisasi walau harus dengan memilikinya (*Merger, acquisitions dan takeovers*). Hal ini dengan pertimbangan untuk meningkatkan kenaikan skala ekonomi dan mempertinggi transfer sumber daya dan kompetensi diantara para pesaing. Tujuan strategi ini adalah untuk mendapatkan kepemilikan dan/atau meningkatkan pengendalian pesaing.

d. Penerobosan Pasar (*Market Penetration*)

Strategi ini berusaha untuk meningkatkan market share bagi produk atau layanan yang ada sekarang pada pasar yang tersedia melalui usaha-usaha pemasaran yang

lebih besar. Tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dengan usaha pemasaran yang maksimal.

e. Pengembangan Pasar (*Market Development*)

Strategi *Market Development* bertujuan untuk memperkenalkan produk atau jasa yang ada sekarang ke daerah-daerah yang secara geografis merupakan daerah baru atau dengan kata lain tujuan strategi ini untuk memperbesar pangsa pasar.

f. Pengembangan Produk (*Product Development*)

Strategi *Product Development* merupakan strategi yang berusaha agar organisasi dapat meningkatkan atau memodifikasi produk atau jasa yang ada sekarang.

g. Diversifikasi Konsentrik (*Concentric Diversification*)

Strategi ini dilaksanakan dengan cara menambah produk dan jasa yang baru, tetapi masih saling berhubungan atau dengan kata lain tujuan strategi ini untuk membuat produk baru yang berhubungan untuk pasar yang sama.

h. Diversifikasi Horizontal (*Horizontal Diversification*)

Strategi ini dilaksanakan dengan cara menambah produk dan jasa pelayanan yang baru, tetapi tidak saling berhubungan untuk ditawarkan pada konsumen yang ada sekarang atau dengan kata lain tujuan strategi ini untuk menambah produk baru yang tidak berhubungan dengan pelanggan yang sama.

i. Diversifikasi Konglomerat (*Conglomerate Diversification*)

Tujuan strategi ini untuk menambah produk baru yang tidak saling berhubungan untuk pasar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan jika industri di sektor ini telah mengalami kejenuhan ada peluang untuk memiliki bisnis yang tidak berkaitan

yang masih berkembang baik serta memiliki sumber daya untuk memasuki industri baru tersebut.

j. Usaha Patungan (*Joint Venture*)

Tujuan strategi ini untuk menggabungkan beberapa organisasi dalam bentuk organisasi baru yang terpisah dari induk-induknya. Hal ini dilakukan jika mereka merasa tidak mampu untuk bersaing dengan organisasi lain yang lebih besar, atau dalam rangka mendapatkan kemudahan-kemudahan lain.

k. Penciutan (*Retrenchment*)

Tujuan strategi ini untuk menghemat biaya agar penjualan ataupun keuntungan dapat dipertahankan dengan cara menjual sebagian aset organisasi. hal ini dapat dilakukan jika sering mendapatkan kegagalan dalam berusaha, kurang efisien dalam berusaha, atau diperlukan reorganisasi internal karena terlalu cepat tumbuh.

l. Penarikan Modal (*Divestiture*).

Tujuan strategi ini adalah menjual sebuah unit bisnis. Hal ini dapat dilakukan jika suatu unit bisnis sudah tidak dapat dipertahankan keberadaannya karena misalnya terus merugi dan berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan.

m. Likuidasi (*Liquidation*)

Strategi ini bertujuan untuk menutup organisasi. Hal ini dapat dilakukan jika organisasi sudah tidak dapat dipertahankan keberadaannya. Dengan menjual harta organisasi, pemegang saham akan dapat memperkecil kerugian.

B. Analisis SWOT dan Analisis Strategis

1. Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (1999 : 18-19), analisis SWOT adalah “Identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi”. Analisis ini berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Untuk dapat melakukan analisis ini, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan eksternal dan lingkungan internal organisasi yang dapat mempengaruhi bisnis organisasi.

Lingkungan Eksternal

Menurut Husein (1999:124) lingkungan eksternal adalah “Lingkungan yang berada di luar kemampuan organisasi sehingga organisasi tidak akan dapat mengendalikan lingkungan tersebut”. Agar dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen, sangatlah penting untuk mengenali dan menganalisis lingkungan eksternal tersebut. Untuk dapat dikenali dan dianalisis maka semestinya lingkungan eksternal tersebut terlebih dahulu dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu :

- a. Lingkungan Makro yang mempunyai dampak pada proses manajerial dan operasional organisasi, tetapi sumber dampak berada di luar organisasi yang biasanya timbul bukan karena masalah yang ada di dalam organisasi. Menurut Suwarsono (1996) yang tergolong dalam lingkungan makro ini adalah

lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik, lingkungan hukum dan kebijakan pemerintah serta lingkungan sosial-budaya.

- b. Lingkungan industri tempat bisnis organisasi berada merupakan lingkungan yang tidak dapat dikendalikan, tetapi dapat berpengaruh langsung pada organisasi.

Menurut Porter (1985) konsep *Competitive* Strategi yang menganalisis persaingan bisnis didasarkan atau 5 variabel utama yang disebut Lima Kekuatan Bersaing.

Kelima kekuatan tersebut adalah :

- a. Masuknya Pendaatang Baru Potensial

Masuknya organisasi pendaatang baru akan menimbulkan sejumlah implikasi bagi organisasi yang sudah ada, misalnya kapasitas yang menjadi bertambah terjadinya perebutan *market-share* serta perebutan sumber daya produksi yang terbatas. Kondisi seperti ini menimbulkan ancaman bagi organisasi yang telah ada. Ada beberapa faktor penghambat pendaatang baru masuk ke dalam suatu industri yang sering disebut dengan hambatan masuk. Faktor-faktor yang dimaksud adalah seperti skala ekonomi differensiasi produk, kecukupan modal, biaya peralihan, akses ke saluran distribusi, ketidakunggulan biaya independen dan peraturan pemerintah.

- b. Persaingan sesama organisasi dalam industri

Persaingan dalam industri sangat mempengaruhi kebijakan dan kinerja organisasi. Dalam situasi persaingan yang oligopolis. organisasi mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi pasar. Persaingan pasar yang sempurna biasanya akan memaksa organisasi menjadi *follower* termasuk dalam hal harga produk. Tingkat persaingan itu dipengaruhi beberapa faktor, yaitu :

jumlah kompetitor, tingkat pertumbuhan industri, karakteristik produk atau jasa, biaya tetap yang besar, kapasitas produksi serta besarnya hambatan keluar.

c. Ancaman dari produk atau jasa pengganti

Organisasi-organisasi yang bersaing dengan produk pengganti. Walaupun karakteristik berbeda, barang substitusi dapat memberikan fungsi atau jasa yang sama. Ancaman produk substitusi adalah kuat bila konsumen dihadapkan pada sedikitnya *switching cost* dan jika produk substitusi itu mempunyai harga yang lebih rendah atau kualitasnya sama, atau bahkan lebih tinggi dari produk-produk suatu industri.

d. Kekuatan tawar-menawar pembeli

Pembeli mampu mempengaruhi organisasi untuk memotong harga, untuk meningkatkan mutu dan jasa dan membandingkan organisasi dengan kompetitor melalui kekuatan yang mereka miliki. Beberapa kondisi yang mungkin dihadapi organisasi antara lain adalah :

1. Pembeli-pembeli dalam jumlah yang besar.
2. Pembeli mampu memproduksi yang diperlukan
3. Sifat produk tidak diferensiatif
4. *Switching Cost* pemasok adalah kecil
5. Produk yang dibeli organisasi mempunyai andil persentase yang besar jarak produksi pembeli sehingga pembeli akan menawarkan insentif kepada pesaingnya yang mampu menyediakan produk yang sama dengan harga yang lebih murah.

6. Pembeli mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah sehingga sensitif terhadap harga dan diferensiasi jasa.
 7. Produk organisasi tidak terlalu penting bagi pembeli sehingga pembeli dengan mudah mencari substitusinya.
- e. Kekuatan Tawar-menawar Pemasok

Pemasok dapat mempengaruhi industri lewat kemampuan mereka untuk menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk atau jasa. Pemasok akan kuat apabila beberapa kondisi berikut terpenuhi, yaitu jumlah pemasok sedikit, produk/jasa yang ada adalah unik dan mampu menciptakan switching cost yang besar, tidak ada produk substitusi, pemasok mampu melakukan integrasi ke depan dan mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang sama yang dihasilkan organisasi dan organisasi hanya membeli dalam jumlah yang kecil dari pemasok.

Lingkungan Internal

Selain kondisi lingkungan eksternal, pemahaman terhadap kondisi lingkungan internal organisasi secara luas dan mendalam perlu dilakukan, sehingga strategi yang dibuat perlu konsisten dan realistis sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dari lingkungan internal ini hendaknya dapat dipahami perihal kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh organisasi sekaligus kekuatannya. Selain mengetahui kekuatan dan kelemahan tersebut, organisasi perlu mengetahui peluang-peluang yang selayaknya dapat dimanfaatkan agar organisasi dapat memiliki keunggulan kompetitif. Dengan tidak memanfaatkan peluang-peluang tadi dapat saja

ia malah menjadi ancaman bagi organisasi, logikanya adalah karena peluang tadi dimanfaatkan oleh pesaing.

Umumnya ada beberapa pendekatan yang dapat dipakai dalam mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor internal organisasi, yaitu pendekatan fungsional, pendekatan unit keunggulan bersaing, pendekatan PIMS (*Profit Impact of Marketing Strategy*), dan pendekatan Rantai Nilai (*Value Chains*). Menurut Suwarsono (1996 : 87) kompetensi (kekuatan dan kelemahan) organisasi dapat dilihat pada berbagai fungsi bisnis yang ada dan dikerjakan di dalam organisasi yaitu : fungsi pemasaran, pembelanjaan (keuangan), operasi dan produksi, sumber daya manusia, riset dan pengembangan, sistem informasi manajemen dan budaya organisasi.

2. Analisis Strategis

Menurut Husein Umar (1999:162) tahapan kerja di dalam pembuatan pengambil keputusan terbagi menjadi 4 tahap. Secara jelas akan dipaparkan berikut ini :

Tahap 1 : Analisis, tahap ini disebut juga input stage karena berfungsi untuk menyimpulkan informasi dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi.

Tahap 2 : Pemilihan Strategi, tahap ini disebut juga matching stage karena berfokus pada pembangkitan strategi-strategi alternatif yang dapat dilaksanakan melalui penggabungan faktor eksternal dan internal utama.

Tahap 3 : Penentuan Alternatif Strategi tahap ini disebut decision stage. Tahap ini menggunakan input dari informasi. Tahap I untuk mengevaluasi secara objektif strategi-strategi alternatif dari hasil Tahap 2 sehingga memberikan suatu basis objektif bagi pemilihan strategi-strategi yang paling spesifik.

Tahap 4 : Acuan Implementasi Strategi. Pada tahap ini organisasi mulai merencanakan langkah-langkah untuk merealisasi penggunaan strategi yang baru.

C. Pariwisata

Sektor pariwisata sebagai satu sektor strategis pembangunan dalam 10 tahun terakhir ini telah mampu menunjukkan kinerja sebagai sektor yang semakin prospektif dan handal dalam menopang pembangunan perekonomian nasional. Karena pertumbuhannya yang sangat pesat dan didukung oleh ketersediaan sumber daya yang besar, sektor pariwisata pada tahun 1997 mampu melesat dan menempatkan posisinya sebagai penyumbang devisa terbesar ketiga setelah migas dan tekstil dengan nilai penerimaan sebesar 5,4 milyar dollar AS atau setara dengan Rp 18,9 trilyun pada kurs dollar AS = Rp .3.500,00. Penerimaan tersebut memberikan kontribusi sebesar 9,61 persen terhadap PDB nasional serta menyerap angkatan kerja nasional 8 persen (sebesar 6,6 juta tenaga kerja). Atas dasar kinerja yang mengagumkan tersebut, pemerintah menetapkan pariwisata sebagai sektor andalan yang diharapkan mampu menyumbangkan devisa terbesar nasional menggantikan sektor migas pada akhir tahun 2004.

Sungguh suatu tekad yang realistis dan tidak berlebihan, karena apabila kita melihat perkembangan industri pariwisata dalam konteks global, yang ada adalah kemajuan pesat dan prospek yang sangat menjanjikan. Berbagai analisis menyebutkan, pariwisata akan menjadi industri terbesar dengan pertumbuhan paling pesat dalam perekonomian jasa, dan akan menjadi penggerak utama perekonomian dunia abad ke-21 bersama-sama dengan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. World Tourism Organization (1998) juga memperkirakan bahwa mobilitas wisatawan dunia akan mencapai angka 900 juta wisatawan pada tahun 2004, di mana kawasan Asian Pasifik (termasuk Indonesia di dalamnya) akan menjadi kawasan tujuan wisata utama yang mengalami pertumbuhan paling tinggi di antara kawasan-kawasan lain di dunia.

Hal tersebut semakin memperkuat analisis bahwa pariwisata akan terus berkembang di seluruh dunia sejalan dengan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah dunia. Perubahan-perubahan faktor sosio-ekonomi dan transisi demografi akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan sektor kepariwisataan. Sebagai contoh, adanya perubahan pola sosial sebagai akibat perubahan menuju ekonomi yang berbasis iptek (*knowledge-based economy*) akan menyebabkan tumbuhnya gaya hidup berbisnis dan sekaligus berlibur (*business and leisure*), keduanya merupakan faktor pendorong penting bagi pesatnya sektor kepariwisataan dunia.

Di sisi lain perkembangan dan kemajuan yang revolusioner di bidang ilmu dan teknologi, khususnya kemajuan di bidang industri perjalanan (*travel*), transportasi/perhubungan (*transportation*), telekomunikasi (*telecommunication*),

serta teknologi informasi (*information technology*), semakin mengukuhkan prospek luar biasa kemajuan industri pariwisata di berbagai kawasan di dunia.

Untuk menjelaskan seberapa signifikan peran sektor pariwisata terhadap peran struktur perekonomian dunia, hasil penelitian World Travel and Tourism Council (1997), menunjukkan bahwa saat ini pariwisata telah menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi dunia, yaitu mencapai 10,9 persen dari GDP dunia; menyerap lapangan kerja sebesar 10,7 persen dari jumlah penduduk dunia; satu dari delapan pekerjaan akan ada di industri pariwisata atau menciptakan sekitar 125 juta kesempatan kerja langsung maupun tak langsung pada tahun 2005. Karena sedemikian prospektifnya industri pariwisata, banyak negara di dunia yang berpaling dan berlomba membangun industri pariwisatanya untuk ikut ambil bagian dalam kompetisi memperebutkan potensi pasar global yang amat besar.

Kecenderungan dan prospek yang sangat cerah ini seharusnya dilihat sebagai peluang yang dapat kita masuki untuk mengangkat peran sektor pariwisata dalam ikut mengentaskan bangsa dari persoalan krisis yang berkepanjangan. Namun disayangkan, karena kenyataannya peran strategis sektor pariwisata tersebut tidak mendapat porsi dan dukungan yang nyata untuk ikut memulihkan perekonomian nasional. Padahal dalam banyak pengalaman peran pariwisata sebagai agen pembangunan (*agent of development*) sudah dapat dibuktikan dari tumbuh dan berkembangnya daerah-daerah yang semula tidak berkembang (*under-developed*) menjadi daerah-daerah yang maju dan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang besar diberbagai wilayah Nusantara, seperti Bali, Lombok, Bintan, Bukittinggi, Sulawesi Utara (Bunaken) dan lain sebagainya.

Oleh karena itu untuk mendorong peran riil sektor pariwisata sebagai agen pembangunan dan lebih khusus lagi peran strategis dalam pemulihan ekonomi, yang diperlukan adalah komitmen pemerintah terhadap peranan tersebut. Pemerintah harus menciptakan iklim dan suasana kondusif yang memungkinkan mata rantai industri pariwisata bergerak kembali sehingga mampu berkontribusi secara efektif dalam ikut menggerakkan perekonomian nasional dan perekonomian di tingkat lokal.

Hal inilah yang sampai saat ini masih belum terkondisi dan dipahami secara baik oleh pihak-pihak yang duduk sebagai penyelenggara pemerintahan. Tingkat urgensi sektor pariwisata sebagai sektor yang mampu berperan taktis dalam pemulihan krisis pun belum mampu dilihat secara nyata. Kesenjangan atau ketidaksamaan cara pandang dalam melihat posisi dan peran penting pariwisata dalam struktur perekonomian nasional ini harus dijelaskan dari dipertemukan.

Kita perlu menyamakan persepsi, bahwa sektor pariwisata adalah bisnis yang sangat unik dan tidak bisa (*unusual*) serta memiliki keterkaitan multisektoral yang sangat tinggi. Oleh karena itu penanganan yang konvensional dan kepekaan terhadap aspek-aspek pendukung yang perlu diciptakan bagi berlangsungnya kegiatan pariwisata.

Dengan mengacu pada pemanfaatan sumber daya wisata yang masih belum optimal di seluruh wilayah nusantara, maka dapat diambil suatu asumsi bahwa kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian nasional akan menjadi berlipat ganda apabila upaya-upaya pembangunannya dapat dilakukan menjangkau wilayah dan aktivitas yang lebih luas lagi.

Kekuatan sektor pariwisata sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara jelas dapat ditunjukkan dari karakternya yang unik sebagai suatu produk dan keterkaitan intersektoral yang tinggi sehingga mampu menggerakkan mata rantai usaha-usaha ikutan yang lebih luas. Indikasi tersebut tercermin secara jelas dari beberapa temuan atau analisis sebagai berikut :

Pertama, sektor pariwisata memiliki karakteristik yang unik dalam hal cara mengonsumsi produk yang dijual. Tidak seperti industri berorientasi ekspor lainnya, konsumen dalam industri pariwisata akan datang ke Indonesia dan berinteraksi secara sosial dan kultural dengan “penyedia produk” (produsen). Karena itu pariwisata memberikan dampak sosio-ekonomi yang besar dan langsung terhadap masyarakat Indonesia daripada kegiatan industri ekspor lainnya.

Kedua, pariwisata merupakan industri jasa pelayanan yang lebih mengutamakan pada dukungan rasio yang tinggi terhadap ketersediaan tenaga kerja daripada besarnya modal. Karakteristik ini sangat berbeda dengan sektor kegiatan ekspor lainnya yang cenderung memerlukan dukungan ketersediaan modal yang besar.

Ketiga, pariwisata memicu dan mendorong terciptanya dampak multiganda (*multiplier effect*) atau daya yang besar, melalui tumbuhnya sektor-sektor usaha skala kecil dan menengah yang akan banyak memasok kebutuhan barang dan jasa pelayanan yang sangat luas dan beragam jenisnya bagi industri pariwisata. Dengan mendorong pemanfaatan sumber daya lokal dan semaksimal mungkin mengurangi atau mengganti komponen impor dan sebaliknya memaksimalkan penerimaan devisa.

Peran sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dapat dilihat pada profil perkembangan sektor pariwisata di Bali. Sebelum industri pariwisata berkembang di Bali tahun 1980-an, PDRB Bali sangat tergantung pada sektor pertanian, dengan kontribusi atau penerimaan pendapatan yang relatif masih rendah, yaitu sebesar 11 persen (1984). Namun dengan tumbuh dan berkembangnya sektor kepariwisataan di Bali, PDRB Bali telah naik hingga mencapai 42,2 persen.

Sementara dari sisi penciptaan lapangan pekerjaan dengan memperhatikan dampak langsung dan tak langsung, diperoleh data bahwa: koefisien efek penggandaan kesempatan kerja dari pengeluaran wisatawan di Bali adalah 1,038 untuk wisman (wisatawan mancanegara). Ini berarti secara keseluruhan jumlah kesempatan kerja yang timbul sebagai akibat kedatangan wisman ke Bali adalah sebanyak 492.382 orang dan kedatangan arus wisnus menciptakan kesempatan kerja bagi 33.818 orang. Sehingga secara keseluruhan kesempatan kerja yang ditimbulkan oleh sektor pariwisata pada tahun 1995 sebanyak 526.200 orang atau 34,14 persen dari seluruh tenaga kerja yang bekerja di Bali. (Erawan, 1999).

Dalam perkembangan lebih lanjut, kemajuan yang pesat sektor pariwisata di Bali secara nyata juga telah menumbuhkan kegiatan-kegiatan ikutan dalam usaha jasa pariwisata maupun sektor usaha-usaha baru di bidang perindustrian dan perdagangan, seperti industri dan ekspor kerajinan ke luar negeri.

Kesemua peran dan posisi strategis sektor pariwisata akan benar-benar berarti dan memberikan dorongan bagi tumbuhnya perekonomian nasional apabila faktor-faktor kunci bagi berlangsungnya kegiatan pariwisata dapat diciptakan dan dijaga kelangsungannya secara nyata. Faktor-faktor tersebut terutama adalah stabilitas

politik yang akan menciptakan rasa aman bagi wisatawan maupun bagi investasi yang ingin ditanamkan di Indonesia.

Dengan diselenggarakannya Konferensi PATA tahun 2003 di Bali, maka *event* tersebut sekaligus akan menjadi kesempatan yang sangat penting dan strategis sebagai momen peluncuran “Strategi Besar Pariwisata Indonesia Abad XXI” kepada dunia, dan menjadi titik tolak bangkitnya kepariwisataan Indonesia di abad ke-21. Oleh karena itu, Konferensi PATA 2003 sebagai titik tolak kebangkitan Pariwisata Indonesia harus benar-benar disiapkan dan diselenggarakan secara maksimal dan memiliki gaung internasional untuk membangun citra dan memantapkan posisi kepariwisataan nasional dalam peta kepariwisataan dunia.

Kedatangan delegasi dari berbagai negara ke kawasan Asia Pasifik, utusan-utusan khusus dari negara-negara sahabat dan badan-badan pariwisata dunia, serta media massa di seluruh dunia akan menjadi kesempatan emas untuk mempromosikan Indonesia dan daerah-daerah tujuan wisata unggulan semaksimal mungkin. Untuk itu berbagai pembenahan dan peningkatan infrastruktur serta pelayanan menjadi salah satu kunci penting bagi keberhasilan penyelenggaraan sekaligus wujud kesiapan kita memasuki kompetisi global menuju bangkitnya citra dan posisi kepariwisataan Indonesia di dalam peta kepariwisataan dunia.

Dalam kaitan ini, sejumlah agenda besar disiapkan dan dilaksanakan untuk memasuki era kebangkitan baru Pariwisata Indonesia , antara lain :

- a. Pengembangan sistem aksesibilitas dan transportasi regional yang akan memberikan kemudahan mobilitas wisatawan ke daerah tujuan wisata (DTW) potensial dan seluruh wilayah Nusantara.

- b. Penyelenggaraan Gelar Seni dan Budaya Akbar di seluruh wilayah propinsi di Indonesia untuk menunjukkan kebhinekaan kebudayaan kita.
- c. Bali sebagai *venue* atau tempat penyelenggaraan harus mampu mempresentasikan berbagai keunikan, keragaman dan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Bali juga harus mampu merepresentasikan citra dan kondisi lingkungan yang kondusif bagi kunjungan wisatawan dunia maupun bagi peluang investasi di Indonesia. Untuk itu berbagai dampak kerusakan yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur kota perlu segera diperbaiki dan ditingkatkan kualitas lingkungannya.
- d. Pembenahan Bandara Ngurah Rai dengan segala fasilitas dan kemudahannya.
- e. Penghijauan dan penanaman pohon pada semua jalan koridor yang akan dilewati delegasi PATA 2003
- f. Garuda Wisnu Kencana Cultural Park sebagai *tetenger* atau *landmark* pariwisata Indonesia harus didukung tahap penyelesaiannya untuk mewujudkan obyek wisata baru yang berkelas dunia dan menjadi magnet penting dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan Konferensi PATA 2003.
- g. Upaya promosi yang efektif harus gencar dilakukan sejak sekarang dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. Hal ini sangat mendasar, karena kita tidak bisa mempengaruhi keputusan pasar untuk melakukan perjalanan ke suatu destinasi kurang dari enam bulan, sehingga dari sekarang hingga tahun 2005 kita perlu mengkondisikan upaya-upaya promosi dan pemasaran.
- h. Pengembangan produk-produk baru yang berkualitas dan berkelas dunia dengan strategi harga (*pricing*) yang tepat. Dalam artian bahwa produk wisata yang kita

miliki tidak boleh dijual murah. Justru harus menempatkan harga yang kompetitif dengan produk dan pelayanan yang berkualitas (*value for money*).

Namun demikian, pada akhirnya satu hal yang teramat penting adalah komitmen departemen dan institusi terkait dalam mendukung agenda besar yang ingin kita wujudkan sebagai titik tolak kebangkitan pariwisata nasional Indonesia.

D. Pajak Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, antara lain (Mardiasmo, 2002 : 146).

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap*.
2. Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual di masyarakat di respon secara negatif
3. Lemahnya infrastruktur dan sarana prasarana umum
4. Berkurangnya dana bantuan dari pusat
5. Belum diketahuinya PAD yang mendekati kondisi riil

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap otonomi dan keleluasan daerah (*local discretion*). Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan

daerah adalah menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah yang riil dimiliki daerah. Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi PAD secara sistematis dan rasional.

Upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) sebenarnya tidak hanya menyangkut peningkatan PAD. Peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Oleh karena itu tidak perlu dibuat dikotomi antara PAD dengan dana perimbangan. Namun juga perlu dipahami bahwa peningkatan kapasitas fiskal bukan berarti anggaran yang besar jumlahnya. Anggaran yang dibuat besar jumlahnya namun tidak dikelola dengan baik (tidak memenuhi prinsip *value for money*) justru akan menimbulkan masalah, misalnya kebocoran anggaran. Yang penting adalah optimalisasi anggaran, karena peran pemerintah daerah nantinya lebih bersifat sebagai fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di daerah. Masyarakat daerah sendiri (termasuk LSM, swasta, perguruan tinggi) yang banyak bergerak membangun daerahnya sesuai dengan kepentingan dan prioritas mereka.

Pemerintah daerah seringkali dihadapkan dengan masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah (*fiscal need*) sementara kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Manajemen PAD terkait dengan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, sedangkan terhadap kebutuhan fiskal daerah perlu dilakukan manajemen pengeluaran daerah secara komprehensif, salah satu caranya adalah dengan membuat standar biaya (misalnya Standar Analisa Belanja). Beberapa strategi yang dapat dilakukan

pemerintah daerah untuk menutup kesenjangan fiskal menurut Mardiasmo (2002 : 147) antara lain :

1. Harus disadari bahwa tidak semua pengeluaran yang direncanakan perlu dilakukan. Pemerintah daerah seharusnya menguji belanja dan biaya-biaya yang terjadi. Barangkali terdapat pengeluaran yang perlu dikurangi atau tidak usaha dikurangi.
2. Mempelajari kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui *charging for service* (penjualan jasa publik)
3. Perlu dilakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan daerah untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik
4. Kemungkinan menaikkan pajak melalui peningkatan tarif dan perluasan subyek dan obyek pajak
5. Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat di sharing dengan daerah. Jika potensinya cukup besar maka pemerintah daerah dapat membantu memobilisasi penerimaan pajak pusat, sehingga bagian dari hasil pajak untuk daerah tersebut tinggi.

Untuk melaksanakan kewenangan daerah yang semakin luas, terutama untuk melaksanakan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentu masing-masing daerah membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih memadai. Artinya, jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah perlu meningkatkan penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah agar dapat mengantisipasi kondisi dinamis kebutuhan pembiayaan daerah.

Pasal 79 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil organisasi milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Dari pernyataan pasal 79 diatas dapat diketahui bahwa sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah meliputi : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah, Laba Organisasi Milik Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut McMaster (1994:25) pajak daerah dapat diartikan dalam tiga cara yaitu :

1. Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dengan kekuasaan hukumnya dan yang dibebankan dan/atau ditagih
2. Pajak yang diatur dengan kekuasaan hukum nasional tetapi dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

3. Pajak yang diatur dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tapi pembayarannya diberikan kepada, dibagi dengan, atau dibebankan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Kaho (1988 : 131) menjelaskan bahwa ada beberapa ciri yang menyertai pajak daerah, yaitu :

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
2. Penyerahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang
3. Pajak daerah dipungut daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya
4. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.

Sejalan dengan hal tersebut Davey (1988 : 101) mengatakan :

“Dalam beberapa hal pemerintah regional dibenarkan oleh undang-undang atau peraturan memunggut, menaksir atau mengumpulkan pajak pendapatan, bersifat paralel akan tetapi berada dengan pajak pendapatan nasional. Secara keseluruhan pembagian administrasi pajak dan perhitungan yang dipakai atas kekayaan di daerah tidak sama dengan peneanaan, pembebasan atau keringanan yang diberikan kepada perorangan untuk tingkat nasional.”

Pajak merupakan sumber umum penerimaan pemerintah yang hampir tidak berubah dan benar-benar dijaga oleh pemerintah pusat. Pembagian hasil penerimaan ini dengan cara penyerahan atau pembagian ada kalanya di cantumkan dalam undang-undang. Beberapa cara Pemerintah Regional di negara kesatuan memperoleh penerimaan yang berasal dari pajak pendapatan sebagian karena kemungkinan oleh

sistem pajak nasionalnya dan lainnya karena perbedaan dasar pajak yang ditetapkan Peraturan pembagian hasil pajak yang dimaksudkan antara lain di cantumkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu pada pasal yang menerapkan tentang pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan.

Sistem pajak pendapatan nasional memiliki ciri-ciri umum tertentu, yang membedakan antara pajak yang dikenal atas penghasilan perorangan dan laba yang diperoleh sebuah organisasi. Penetapan bagi pajak perorangan dengan cara mengenakan pajak atas pendapat hasil seseorang setelah dikurangi biaya-biaya dan potongan yang biasanya berbeda antara satu keluarga dengan yang lainnya. Pajak organisasi dikenakan atas laba yang diperoleh suatu organisasi setelah diperhitungkan dana untuk penyusutan.

Pajak pendapatan perorangan biasanya bersifat progresif sedangkan tingkat pajak yang berbeda dikenakan terhadap laba suatu organisasi yang biasanya dimulai dari prosentase yang tinggi. Tingkat pajak perorangan seringkali dibedakan antara dan penghasilan yang diperoleh seseorang akan tetapi bukan merupakan suatu pendapatan dimana yang terakhir ini tingkat pajaknya dikenakan lebih tinggi. Tunjangan yang diberikan kepada perorangan (*personal allowances*) adalah untuk meringankan golongan berpenghasilan rendah. Bagi negara-negara berkembang hal ini secara efektif memberikan keringanan untuk sebagian terbesar dari jumlah penduduknya. Dalam hal ini administrasi pajak pendapatan nasional secara nyata memusatkan perhatian pada gaji di sektor formal yang diterima oleh pegawai pemerintah, swasta dan laba atas organisasi.

Dalam hal penerapan pajak-pajak yang demikian itu, Davey (1988:100) mengatakan :

“Partisipasi pemerintah regional dalam hal pajak pendapatan dapat berupa duplikasi pajak pusat, pajak-pajak tambahan atau pembagian hasil pajak yang dipungut (*sharing*). Dua jenis lainnya pajak profesi dan pajak perorangan umum dilaksanakan sekaligus atau sebagian secara terpisah”.

Untuk itu, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemungutan jenis-jenis pajak tertentu oleh masing-masing daerah, yang dengan peraturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk mengelola sumber-sumber penerimaan pajak di daerah.

Dari Kabupaten dan kota memiliki berjenis-jenis pajak daerah. Jumlah seluruhnya lebih dari 50 jenis, tetapi sebagian besar pemerintah daerah hanya memunggut 8 sampai 12 jenis saja. Sebagian besar pajak dipungut atas dasar peraturan pemerintah daerah, meski banyak pula yang berdasarkan penyerahan pajak nasional pada daerah”. (Devas 198 : 59).

Untuk menilai berbagai pajak daerah, ada beberapa tolok ukur (Devas 1989 : 61-63) sebagai berikut :

- a. Hasil (*yield*), yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil itu, elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
- b. Kejadian (*equity*) yaitu dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya

beban pajak harus sama besarnya antara berbagai kelompok yang berbeda, tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, dan harus adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi, dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, dan arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan wewenang dalam beban pajak dari suatu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

- c. Daya guna ekonomi, artinya pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah satu arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak.
- d. Kemampuan melaksanakan yaitu suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha
- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah, yaitu haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memunggut pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain.

Keberhasilan dalam mengelola sumber-sumber penerimaan pajak daerah ini tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah itu sendiri dalam mengoptimalkan faktor-faktor yang turut menentukan keberhasilan tersebut. Pandangan seperti itu perlu dipertimbangkan karena sesungguhnya terdapat suatu fenomena hubungan yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan pasar, termasuk

pengaruh global. Selain itu keberhasilan penerapan peraturan perpajakan harus didukung oleh struktur organisasi perpajakan dan sumber daya manusia dalam administrasi pajak.

Bird dan Jantscher (Bird dan Jantscher, 1990 dalam Muluk, 1992:343), mengatakan bahwa :

“Administrasi pajak yang baik melibatkan berbagai faktor, seperti bentuk administrasi pajak itu sendiri, kredibilitas pegawai, kesiapan mereka untuk memberikan pelayanan dan banyak lagi. Struktur organisasi adalah bentuk formal yang dibutuhkan sebuah organisasi untuk beroperasi, sebuah sistem yang terintegrasi yang memproses informasi dan memecahkan masalah. Dalam mendesain struktur organisasi yang tepat akan membantu untuk mengurangi ambiguitas dan meningkatkan produktivitas. Keuntungan pegawai berasal dari seperangkat aturan yang koheren dikarenakan mereka mengetahui secara tepat apa yang diharapkan dari mereka dan tujuan yang akan dicapai”.

Penentuan orang yang tepat adalah dasar manajemen. Tapi ini adalah suatu hal yang kadang sulit untuk dilakukan. Pegawai bukan saja mencari gaji, namun juga mereka menginginkan untuk bekerja pada suatu tingkatan tertentu dimana mereka dapat bekerja secara maksimal. evaluasi dan penempatan pegawai secara tepat adalah suatu kebutuhan untuk semua organisasi.

Lebih lanjut Bird dan Jantscher (Bird dan Jantscher, 1990 dalam Muluk, 1992 : 343), mengatakan bahwa :

“Tantangan yang dihadapi oleh pihak manajemen adalah soal promosi dan proses monitoring yang kontinyu pada masing-masing tingkat pegawai, dimana keseimbangan melibatkan 3 variabel, yaitu 1) kemampuan masing-masing individu, 2) tempat bekerja dimana mereka harus bekerja, 3) kompensasi yang diterima. Evaluasi awal atas tanggungjawab manajemen ini akan memungkinkan untuk meningkatkan kepuasan bekerja dan sebagai hasilnya produktivitas seluruh organisasi akan meningkat”.

Seluruh faktor SDM perpajakan, faktor masyarakat sebagai wajib pajak tidak dapat dilupakan keberadaannya. Suatu badan usaha atau seseorang baru bisa “dengan sukarela ia memenuhi kewajibannya pajaknya” apabila ia sendiri mempunyai kemampuan lebih untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Tetapi sebaliknya, jika kenyataan menunjukkan bahwa ternyata pendapatan seseorang (bila halnya dimaksud pajak perseorangan) tidak layak untuk dikurangi pajak penghasilan dan daya belinya melemah karena harga-harga meninggi, atau keuntungan suatu badan usaha (bila halnya adalah pajak badan usaha) tidak memadai untuk memenuhi kewajiban pajak organisasi, maka logikanya sumber-sumber penerimaan pajak Daerah semakin berkurang. Kondisi ini bisa diatasi apabila strategi kebijakan alokasi anggaran pembangunan untuk sektor-sektor perekonomian Daerah dapat menjadi faktor pendukung bagi meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini akan berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi daerah, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi berkorelasi juga dengan PAD.

E. Administrasi Pajak daerah

Menurut Atmosudirjo (1986 : 100), administrasi suatu fungsi yang tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh team bawahannya, terutama para manager dan staffer.

Ditempat lain Piffifner (1994 : 87) merumuskan pengertian administrasi sebagai berikut : “*Administration may be defined as the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends*”.

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, maka administrasi pajak juga mempunyai dua pengertian, yakni administrasi pajak dalam arti luas dan administrasi pajak dalam arti sempit. Administrasi pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai fungsi, sistim dan lembaga (Nurmantu, 1994 : 88).

1. Fungsi

Administrasi pajak sebagai fungsi meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan.

a. Fungsi perencanaan

Administrasi pajak sebagai bagian dari administrasi publik merupakan dan melakukan juga fungsi perencanaan yakni untuk merencanakan apa yang akan dicapai fiskus baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang (Nurmantu 1994 : 89)

b. Fungsi pengorganisasian

Administrasi pajak sebagai bahagian administrasi publik merupakan dan melakukan fungsi untuk pengorganisasian dalam bentuk pengelompokkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan para petugas (orang-orangnya) sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efisien (Nurmantu, 1994 : 89).

c. Fungsi Penggerakan

Administrasi pajak sebagai bahagian dari administrasi publik merupakan dan melakukan juga fungsi penggerakkan dalam bentuk kegiatan mempengaruhi pegawai untuk menjalankan tugasnya sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Fungsi penggerakan

menduduki tempat yang strategis karena fungsi inilah sangat berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Fungsi penggerakan meliputi pemberian motivasi kerja kepada pegawai sedemikian rupa supaya mereka berkerja dengan semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Selain motivasi, hal-hal yang penting lain dalam fungsi penggerakkan adalah kepemimpinan, komunikasi, penilaian dan pengembangan (Nurmantu, 1994 : 89).

2. Sistem

Administrasi pajak sebagai suatu sistem adalah seperangkat unsur saling berkaitan yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu. Jika ditinjau dari kenyataan yang ada dalam praktek, maka yang dimaksud dengan seperangkat unsur dalam administrasi pajak adalah (Nurmantu, 1994:96)

- a. Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya
- b. Aparat birokrasi yang menangani masalah perpajakan
- c. Gedung, peralatan mesin
- d. Masyarakat wajib pajak

Yang apabila melakukan fungsi masing-masing secara bersama-sama akan mencapai tujaun bersama, yakni pemasukan pajak ke dalam kas negara.

Administrasi pajak daerah suatu sistem merupakan suatu sub sistem dari keuangan daerah. Selanjutku keuangan daerah hanya merupakan suatu sub sistem dari administrasi pemerintah daerah, demikianlah setiap sistem merupakan

suatu subsistem dari sistem yang lebih luas yang satu sama lain saling berhubungan, saling kait berkait dalam suatu lembaga yang kompleks.

3. Lembaga

Administrasi pajak dapat dilihat sebagai suatu lembaga yaitu sebagai salah satu lembaga-lembaga pembuat kebijakan perpajakan, yang terwujud pada adanya fakto-faktor mulai dari kantor pusat direktorat Jenderal pajak bumi dan bangunan, kantor penyuluhan perpajakan, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak yang telah dibahas di atas. (Nurmantu, 1994 : 97).

Sedangkan administrasi pajak dalam arti sempit adalah piñata usahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak. Yang dalam kegiatan piñata usahaan adalah pencatatan (*recording*), penggolongan (*classifying*) dan penyimpanan (*filig*),. Piñata usahaan adalah alat bantu bagi pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi, artinya peñata usahaan yang dilakukan di KPP adalah alat bantu Kepala KPP dalam melaksanakan tugasnya, yang termasuk dalam pelayanan antara lain penetapan prosedur, penyediaan berbagai formulir dan informasi yang dibutuhkan wajib pajak. Yang termasuk dalam wajib pajak antara lain (Nurmantu, 1994 : 99).

1. Mendaftarkan diri dari KPP untuk mendapatkan NPWP
2. Mengambil formulir SPT di KPP
3. Mengisi dan menandatangani SPT (Surat Pemberitahuan)
4. Menyampaikan SPT ke KPP dalam jangka waktu tertentu
5. Melunasi pajak yang terhutang tepat pada waktunya

6. Mengadakan pembukuan bagi orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
7. Memikul sanksi perpajakan apabila lalai atau sengaja melanggar kewajiban perpajakan.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaran pemunggutan ajak keberhasilan disamping dari unit organisasi serta SDM, juga sangat tergantung dari berbagai kebijaksanaan yang diambil dalam penyelenggaraan pemunggutan itu sendiri. agar dapat memberikan hasil guna (*effectiveness*) maka dalam kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak harus diperhatikan tahap-tahap dalam pemungutan pajak. Ukuran hasil guna yang dimaksud adalah mengukur hubungan antara lain pungut suatu pajak dan potensi hasil pajak tersebut, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak, seluruh pajak terutang masing-masing (Devas, 1989 : 144). Adapun tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Menentukan wajib pajak (pendataan)

Yang dimaksud disini adalah istilah yang lebih populer yaitu kegiatan pendataan. Pada prinsipnya kegiatan pendataan ini adalah upaya aparat pajak untuk menjaring wajib pajak ataupun obyek pajak yang lolos dari pengenaan pajak. Haruslah ada prosedur pajak yang menyulitkan wajib pajak untuk menyembunyikan hutang pajaknya. (Devas, 1989 : 144). Yang dimaksud disini adalah ada ketentuan yang mengikat jangan sampai ada objek pajak yang tidak terjaring karena adanya kesengajaan dari wajib pajak untuk menyembunyikan diri. Kondisi ini dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak yang berakibat berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

b. Menetapkan nilai pajak yang terhutang (perhitungan dan penepatan pajak)

Seperti telah dikemukakan bahwa besarnya pajak yang terhutang harus ditentukan dengan cermat. Disini juga menyangkut tarif yang sesuai. Dan kendala yang sering ada adalah karena melibatkan adanya wajib pajak dan petugas pajak, bahwa : Semakin besar kewenangan petugas pajak untuk menentukan besarnya yang terhutang, akan semakin besar peluang berunding dengan wajib pajak, sehingga akan semakin kurang cermat besarnya perhitungan pajak yang dihasilkan (Devas 1989 : 144). Disini peran pengawasan serta mekanisme perhitungan ketetapan pajak sangat penting. Karena jika penetapan pajak lebih kecil dari kenyataan yang sebenarnya akan berakibat buruk adanya gap pajak, yaitu gap jarak antara potensi dan realisasi.

c. Memungut pajak (penagihan pajak)

Hal yang perlu diperhatikan kelinatannya adalah waktu penagihan. Yaitu perlunya menagih pajak yang terhutang tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan, karena kalau tidak tepat waktu, akan ada persoalan daluwarsa atau hilangnya hak menagih bagi petugas Pajak (Devas, 1989 : 144) Oleh karena itu, dibuat mekanisme yang memaksa wajib pajak harus melunasi hutang pajak. Misalnya : bagi pengusaha hotel dan restoran tidak diberi perpanjangan izin jika tidak dapat melampirkan surat fiscal (surat tanda lunas pajak). Adanya sanksi yang cukup berat bagi wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya.

d. Pemeriksaan kelalaian pajak

Seperti telah dikemukakan diatas bahwa kegiatan pemeriksaan ini mempunyai maksud untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

Atau istilah lain untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

e. Penyelesaian sengketa pajak

Dalam prinsip perpajakan antara lain mengenal adanya prinsip keadilan, kemudahan, efisiensi, kepastian, dan lain-lain kaitannya dengan penyelenggaraan pemungutan pajak ini ada unsur penyelesaian sengketa pajak. Untuk itu perlu adanya pertimbangan akan hak wajib pajak ini dapat terjamin sesuai prinsip-prinsip di atas.

Untuk dapat lebih meningkatkan penerimaan dari pos pajak daerah, maka peningkatan administrasi pajak daerah menjadi sangat vital. Proses peningkatan ini mungkin meliputi reformasi pada hukum pajak property dan sistem untuk meningkatkan penerimaan dari para penunggak pajak dengan cara pembayaran yang lebih efisien, meliputi peningkatan metode indentifikasi, registrasi, dan pengumpulan/pembayaran; mengembangkan sistem persediaan comprehensive, pengaturan surat pajak yang hilang, termasuk pengukuran yang tepat atas seluruh tanah dan bangunan dan diklafikasikan dengan nilai yang tepat, meningkatkan sistem penilaian, dan merencanakan sistem monitoring yang lebih baik, pengumpulan dan pelaporan finansial (Mc. Master, 1994 : 43).

Peningkatan administrasi pajak biasanya memerlukan program training intensive dalam hal komputersasi tagihan dan catatan pajak, metode penilaian property, analisis biaya dan sistem akuntansi. Terkait dengan hal tersebut, prinsip administrasi penerimaan meliputi implementasi kebijaksanaan fiscal dengan proses indentifikasi/registrasi pembayar pajak dan konsumen, koreksi. Terkiat dengan

kemungkinan administrasi dari sumber pajak daerah, dua pengukuran yang dapat digunakan adalah (Mc. Master 1994 : 44).

1. Realisasi – pendekatan hasil sebenarnya pada sumber penerimaan potensial (potensial yang dihasilkan, dengan asumsi setiap orang yang harus membayar, benar-benar membayar dan membayar penuh kewajiban pajaknya.
2. Biaya – jumlah sumber biaya yang digunakan dalam mengumpulkan penerimaan dalam kaitannya dengan hasilnya, diukur dalam sumber daya fiscal atau sumber daya manusia (dan juga kekuasaan publik – meskipun hal tersebut sulit untuk diukur).

Dalam kaitannya dengan realisasi, tujuan administrasi penerimaan pajak daerah adalah meyakinkan bahwa (Mc. Master : 1994 : 44)

1. Setiap orang yang berkewajiban membayar pajak telah melaksanakan kewajibanya
2. Setiap orang membayar jumlah yang sebenarnya/tepat
3. Semua penerimaan lebih dahulu dihitung oleh yang berwenang untuk mengumpulkannya.

tujuan tersebut di atas berarti bahwa dalam tujuan administrasi penerimaan pajak daerah harus prosedur sebagai berikut (Mcmaster, 1994 : 44).

1. Mengidentifikasi semua orang yang wajib pajak
2. Mengenakan pajak dalam jumlah yang benar
3. Mengumpulkan pembayaran sesuai dengan jumlah pajak
4. Mengoreksi siapa yang tidak membayar dan mengenakan sanksi

5. Mengawasi penerimaan sebenarnya yang diterima oleh kolektor untuk meyakinkan hasil pajak tersebut dibawa untuk dihitung.

Untuk mencapai realisasi tersebut ada beberapa hambatan, antara lain (Mc. Master, 1994 : 44)

1. Keinginan wajib pajak untuk menghindari membayar pajak atau untuk membayar kurang dari jumlah yang sebenarnya dibayar
2. Kolusi – keinginan para petugas pajak untuk membiarkan para wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi pembayaran atau untuk membatalkan atau menahan penerimaan yang telah mereka terima.

Hambatan-hambatan dapat menimbulkan resiko yang bermacam-macam, antara lain dalam hal (Mc.Master, 1994 : 45-46)

1. Identifikasi – wajib pajak menghindari proses identifikasi atau kolektor pajak dapat mengidentifikasi wajib pajak tapi gagal untuk menerapkan pajak yang harus dibayar.
2. Penaksiran – wajib pajak menyembunyikan kewajiban pembayaran pajaknya atau kolektor pajak disuap dalam hal penaksiran
3. Pembayaran – wajib pajak tidak dapat membayar pajaknya, kolektor gagal dalam menarik pembayaran pajak atau wajib pajak membayar tapi kolektor menahan/memakan sendiri uangnya.

Untuk itulah perlunya efisiensi dan efektifitas dalam administrasi penerimaan pajak daerah yang pada akhirnya untuk menciptakan prosedur yang dapat meminimalisir semua jenis resiko tertentu. Sebuah unsur yang penting dari kebijakan

fiscal adalah juga dalam hal memilih sumber pendapatan dengan prosedur yang telah tersedia.

F. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dana yang bersumber dan keuangan daerah yang digali dan dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Supendi, 2002, h. 192). Kontribusi komponen-komponen PAD terhadap pembentukan PAD yang paling signifikan adalah komponen pajak dan retribusi. Diperkirakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah adalah sektor-sektor ekonomi bidang jasa yang terdiri dari ; (1) sektor listrik, gas, dan air bersih, (2) sektor perdagangan, hotel dan restoran, (3) sektor perhubungan dan komunikasi, (4) sektor perbankan dan lembaga lembaga lainnya serta (5) sektor jasa-jasa lainnya.

Sektor pajak daerah tidak ada bedanya dengan pajak negara dalam fungsinya sebagai sumber penerimaan. Sehubungan dengan fungsi pajak tersebut maka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak harus dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan penerimaan daerah dalam kerangka kemandirian dibidang keuangan daerah. Langkah — langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perluasan pajak, apabila pajak yang sudah dikenakan wajib pajak tertentu, maka wajib pajak yang belum dikenai pajak supaya diusahakan dikenai pajak yang bersangkutan, atau sebagai penertiban wajib pajak.

2. Perluasan jenis pajak dan besarnya penghasilan yang dikenai pajak baik atas pendapatan, pajak atas konsumsi ataupun pajak kekayaan, dengan mengusahakan macam macam pajak baru yang belum dipungut oleh daerah akan dapat meningkatkan pendapatan daerah.
3. Penyempurnaan tarif pajak, didalam penyempurnaan tarif pajak perlu diperhatikan kondisi dan kemampuan kebanyakan wajib pajak. Bila tingkat pendapatan rata rata wajib pajak telah tinggi, dan dinilai kemampuan membayar tinggi, maka selayaknya bila tarif pajak diadakan penyesuaian.
4. Penyempurnaan administrasi pemungutan pajak akan mempunyai pengaruh yang besar pada ketertiban dalam pengelolaan pajak (Soemitro, 1996., h.80)

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat simpulkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah dana daerah yang bersumber hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang digunakan untuk kepentingan daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu bagian yang sangat penting dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data, keterangan-keterangan serta fakta-fakta yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

Menurut Sugiono (2003:39) metode penelitian “merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan-tujuan tertentu”. Sedangkan Irawan (1999 : 63) menjelaskan pengertian metodologi penelitian yaitu

Sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek atau subyek metode penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penulisan tesis ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeteskiskan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya”.

Lebih Lanjut Irawan (1999 : 10) menyebutkan : “Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta”. Sehubungan dengan hal tersebut, Winarno (1998 : 131) mengemukakan ciri-ciri penelitian deskriptif sebagai berikut :

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah sekarang, pada masalah-masalah faktual.
2. Data yang dikumpulkan dan disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa (karena itu metode ini sering juga disebut metode analitik).

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, maka metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Irawan (1999 : 14) metode deskriptif kuantitatif menekankan kepada “Segi pengamatan langsung secara partisipatif oleh peneliti sehingga akan diungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatarbelakanginya”.

Oleh karena itu, proses penelitian deskriptif dilakukan melalui penyelidikan dengan cara menggambarkan, menuturkan dan menafsirkan keadaan subyek atau obyek penelitian sebagaimana adanya berdasarkan data dan fakta yang ditemukan, sehingga dapat diungkapkan fenomena-fenomena yang teramati, baik berupa situasi, hubungan yang terjadi, proses atau kegiatan yang sedang berlangsung.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer diperoleh penulis dari pengamatan langsung dan hasil wawancara dengan pejabat terkait.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada beberapa subyek yang relevan dengan masalah penelitian, misalnya dengan :

- 1) Ketua Bappeda Kabupaten Bangka akan meliputi masalah perencanaan secara makro daerah.
- 2) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka, menyangkut pembinaan dan pengawasan obyek pariwisata.
- 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, menyangkut akses-akses fisik dan prasarana yang mendukung pembangunan sektor pariwisata.
- 4) Telkom, menyangkut kontribusinya terhadap informasi-informasi pariwisata.
- 5) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka menyangkut sejauh mana pelestarian budaya, peninggalan-peninggalan arkeologi.
- 6) Pihak swasta, menyangkut partisipasi penyediaan pelayanan, akomodasi, transportasi, urusan promosi dan sebagainya.
- 7) Tokoh masyarakat, meliputi sejauh mana dukungan dalam menunjang perkembangan kepariwisataan daerah.

b. Kuesioner

Daftar pertanyaan terhadap variabel kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yang disebarakan kepada pegawai Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah, serta Dinas yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini dengan cara mendatangi Kantor-Kantor Dinas dan menyebarkan lembaran kuesioner secara terbuka dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari.

c. Observasi

Melakukan observasi langsung terhadap obyek-obyek yang relevan dengan masalah penelitian, misalnya lokasi obyek wisata, serta aktivitas manajemen dari Dinas Pariwisata dan Dinas-dinas lainnya yang notabene sebagai pengendali dan pelaksana operasional promosi dan pelayanan pariwisata serta pendukung pengembangan pariwisata di daerah.

2. Data Sekunder (Studi Dokumen)

Data sekunder adalah data-data yang penulis ambil melalui satu teknik riset Perpustakaan (*library research*) untuk melengkapi data primer yang telah penulis dapatkan dari riset, maka penulis juga mengambil data sekunder dari berbagai sumber antara lain buku-buku, literatur, bahan kuliah dan majalah-majalah, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bangka Tahun 2001 – 2004, serta arsip-arsip tertulis lainnya yang dapat berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Teknik Analisa

Untuk memecahkan masalah satu dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa SWOT, yaitu untuk mengetahui strategi apa yang diterapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka dalam pengembangann pariwisata di kabupaten Bangka.

Dalam analisa SWOT, dimensi yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- 1). Kekuatan (*strength*), indikatornya
 - a). Melengkapi sarana obyek pariwisata yang sedang bertumbuh.
 - b). Pemimpin pasar
 - c). Jenis wisata yang beragam
 - d) Dapat dipakai sebagai analisis pengembangan pariwisata
 - e). Memiliki pertumbuhan keuntungan yang fantastis
 - f) Memiliki kekuatan potensi daerah yang subur, pertumbuhan ekonomi
 - g) Dapat menggunakan fasilitas obyek wisata.
- 2) Kelemahan (*weakness*), indikatornya
 - a) Transportasi antar daerah obyek wisata masih sulit.
 - b) Potensi pariwisata yang kurang dapat dikembangkan karena keterbatasan APBD
 - c) Menghadapi persaingan yang luas di beberapa kota dalam pengembangan pariwisata
- 3) Peluang (*opportunities*), indikatornya :
 - a) Dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia
 - b) Dapat berkonsolidasi dengan daerah lain
 - c) Pertumbuhan yang baik
 - d) Dapat bersinergi dengan BUMD yang lain.
- 4) Ancaman (*threat*), indikatornya :
 - a) Adanya persaingan dengan obyek wisata daerah lain
 - b) Adanya isu terorisme di Indonesia
 - c) Politik yang tidak stabil

- d) Banyaknya bencana alam
- e) APBD yang tersedia sangat kurang

Untuk memecahkan masalah dua dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis komporasi, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap kecenderungan-kecenderungan sosial masyarakat yang mempengaruhi perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Untuk memecahkan masalah tiga dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif, yakni dengan mengadakan pengamatan langsung untuk kemudian didiskripsikan sehingga akan diungkapkan fenomena-fenomena yang ada dilapangan yang disajikan secara proporsi (persentase) maupun jumlah nominalnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Temuan

1. Luas Wilayah dan Geografis Kabupaten Bangka

a. Luas Wilayah

Kabupaten Bangka merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas seluruhnya, 1.153.414,2 Ha, atau 11.534,142 Km². Pada mulanya Kabupaten Bangka dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) adalah merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Selatan, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Belitung Timur, Kabupaten Bangka (Induk), yaitu Kabupaten Bangka yang dijadikan objek/lokasi penelitian ini. Diharapkan menjadi Kabupaten andalan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sehingga Kabupaten Bangka (Induk) setelah pemekaran daerah, maka luasnya \pm 2.950,68 Km². Dan secara administratif wilayah Kabupaten Bangka (Induk) berbatasan dengan :

- 1) Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna.
- 2) Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang.
- 3) Di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Gaspar.
- 4) Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat dan Selat Bangka.

Secara administrasi, Kabupaten Bangka terdiri dari 8 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 59 Desa. Kedelapan Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut

1. Kecamatan Sungailiat
2. Kecamatan Belinyu
3. Kecamatan Riau Silip
4. Kecamatan Bakam
5. Kecamatan Pemali
6. Kecamatan Merawang
7. Kecamatan Mendo Barat
8. Kecamatan Puding Besar

Untuk lebih jelasnya mengenai luas Kabupaten Bangka dapat dilihat, pada peta yang terlampir.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Bangka (Induk) tahun 2004 sebanyak 204.409 jiwa dan dari data yang tersedia pada tahun 2004 jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif sama banyak yakni penduduk laki-laki sebanyak 101.112 jiwa atau sebesar 49,77 % dari seluruh penduduk Kabupaten Bangka,

sedangkan penduduk perempuan sebanyak 103.297 jiwa atau sebesar 50,23 % dari seluruh penduduk Kabupaten Bangka.

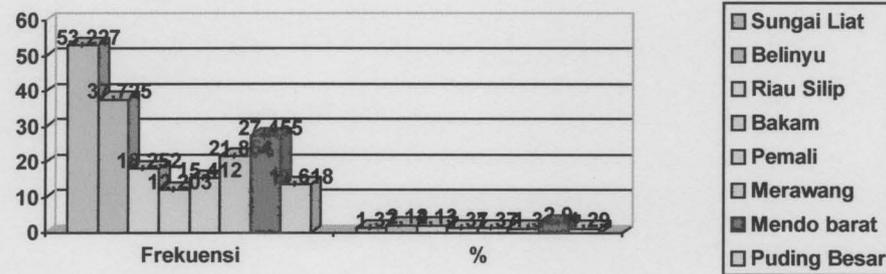
Sumber Daya Manusia

Untuk pemeratakan hasil-hasil pembangunan, khususnya pembangunan sumberdaya manusia sebagai ujung tombak daerah untuk mengembangkan daerahnya. Untuk itu pemberdayaan SDM merupakan hal utama yang harus mendapat perhatian pemerintah daerah. Sebab jumlah penduduk yang cukup besar bila kualitasnya kurang memadai dan tidak diberdayakan secara maksimal tidak akan mempunyai arti bagi pembangunan daerah dan bisa jadi menjadi beban pemerintah daerah. Untuk itu dengan adanya pemekaran daerah, maka konsentrasi pemerintah daerah dapat lebih maksimal karena jangkauan wilayahnya lebih kecil. Disamping itu peluang para pekerja untuk memperoleh pekerjaan lebih besar serta tersedianya pasaran bagi hasil-hasil produksi.

Secara terperinci jumlah penduduk, persebaran penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bangka selama 2 tahun terakhir (2003-2004), disajikan dalam diagram 4.1 :

Diagram 4.1

Jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2004

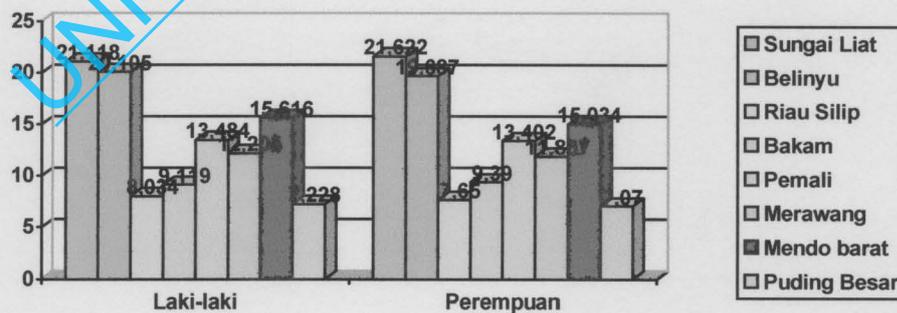


Sumber : BPS Kabupaten Bangka (Sumber Tabel 4.1, lampiran)

Penduduk Kabupaten Bangka Induk tahun 2003 berjumlah 199.746 jiwa dan tersebar pada 8 kecamatan dan pada tahun 2004 naik menjadi 204.409, dengan demikian tingkat pertumbuhan menjadi 0,58% (dalam 5 tahun terakhir). Sedangkan gambaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio dapat di lihat dari diagram berikut ini :

Diagram 4.2

Diagram rasio sek penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2004



Sumber : BPS Kabupaten Bangka (Sumber tabel 4.2, Lampiran)

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa sex ratio Kabupaten Bangka pemekaran jumlah penduduk laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk paling banyak ada diwilayah Kecamatan Sungailiat yaitu 44.092 jiwa.

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (sex ratio) adalah 102,05% dalam arti setiap 10.205 orang laki-laki terdapat 10.000 orang perempuan. Sedangkan jumlah kecamatan yang paling tinggi sex rasionya adalah Kecamatan Riau Silip, yaitu 105,10%.

Kalau dilihat dari komposisi jumlah rumah tangga di Kabupaten Bangka pemekaran adalah 48.215 rumah tangga dengan demikian setiap rumah tangga beranggotakan antara 4 sampai 5 orang. Sedangkan kecamatan yang jumlah rumah tangganya terbanyak adalah Kecamatan Sungailiat yaitu 10.213 rumah tangga.

c. Wilayah Administrasi

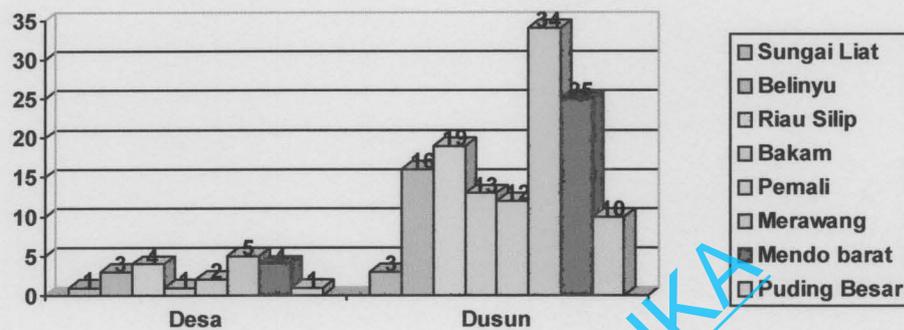
Kabupaten Bangka (Induk) merupakan satuan wilayah pembangunan Sungailiat dan Bangka Utara. Wilayah pembangunan Sungailiat merupakan wilayah pengembangan pertambangan, industri dan pariwisata. Sedangkan wilayah pembangunan Bangka Utara merupakan wilayah pengembangan pertambangan dan industri bahan galian tambang, serta sebagai pelabuhan antar pulau dan ekspor.

Kabupaten Bangka Induk memiliki luas $\pm 2.950,08 \text{ Km}^2$ dengan jumlah penduduk 204.409 jiwa pada tahun 2003, secara administratif sebagaimana tersebut diatas Kabupaten Bangka terdiri 8 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 59 Desa. Untuk

mengetahui secara terperinci wilayah administrasi Kabupaten Bangka pemekaran dapat di lihat dalam diagram berikut :

Diagram 4.3

Desa dan Dusun di Kabupaten Bangka tahun 2004



Sumber : BPS Kabupaten Bangka (Sumber tabel 4.3, Lampiran)

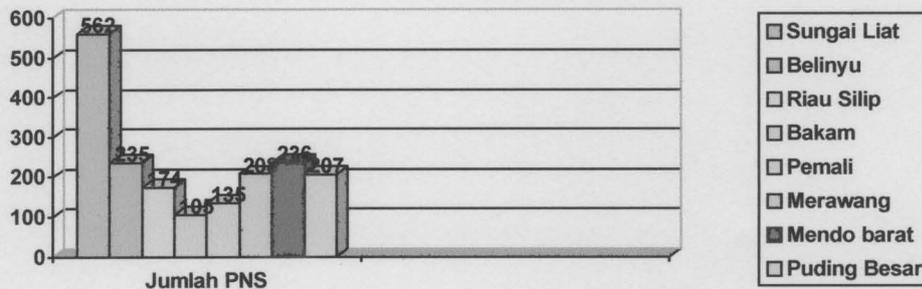
g. Aparatur

Jumlah PNS yang berada di wilayah kecamatan di KABUPATEN BANGKA (INDUK) adalah 1.928 orang PNS yang terdiri dari : 12 orang PNS golongan I; 357 orang PNS golongan II; 1.370 orang PNS golongan III; dan 23 orang PNS golongan IV.

Sedangkan dilihat dari persebaran pegawai tidak merata, yaitu yang paling banyak jumlah pegawainya adalah Kecamatan Sungailiat mencapai 562 orang PNS dan yang paling sedikit jumlah pegawainya adalah Kecamatan Bakam (hanya 94 orang PNS). Untuk mengetahui selengkapnya dapat diperhatikan diagram berikut :

Diagram 4.4

Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan Penempatan per Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2004



Sumber : BPS Kabupaten Bangka (Sumber tabel 4.4 lampiran)

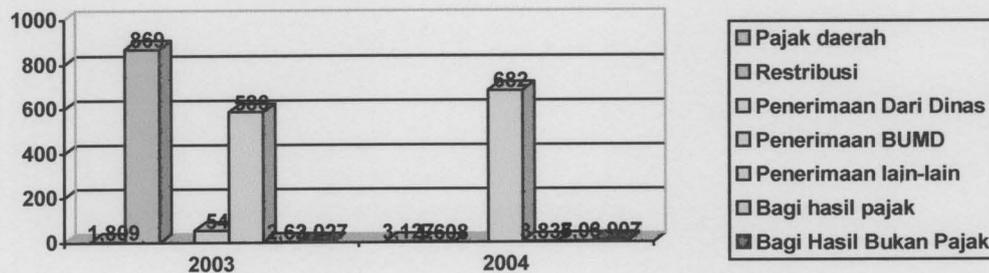
Jumlah PNS di Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka adalah 24 orang PNS, terdiri dari 4 Orang PNS Golongan II, 17 orang PNS Golongan III dan 3 orang PNS Golongan IV (struktur organisasi terlampir).

2. Keuangan Daerah Kabupaten Bangka

Keuangan daerah adalah rangkaian dari keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan penganggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah dan penerimaan pembangunan serta urusan kas dan perhitungan anggaran belanja daerah terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Untuk membiayai aktifitas pemerintahan diperlukan sumber-sumber keuangan yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan daerah dapat diperhatikan tabel di bawah ini.

Diagram 4.5
Realisasi PAD tahun 2003 - 2004



Sumber : BPS Kabupaten Bangka (Sumber tabel 4.5 lampiran)

Data tersebut memperlihatkan pendapatan daerah sendiri yang diperoleh dari semua jenis pendapatan yang ada, kecuali dari jenis penerimaan dinas. Hal ini dikarenakan Pemda Kabupaten Bangka beranggapan fungsi pemerintah adalah pelayanan, maka semua pelayanan digratiskan, kecuali retribusi daerah dan pajak daerah. Sedangkan memperoleh pendapatan dari penerimaan BUMD hanya Kabupaten Bangka (Induk).

Penerimaan PDS Kabupaten Bangka (Induk) tahun 2004 mengalami kenaikan yang sangat besar yaitu dari Rp 7.257.242.512,40 pada tahun 2003 menjadi Rp 21.194.300.314,22 pada tahun 2004 atau mengalami peningkatan sebesar 192,04%. Kenaikan yang sangat besar ini karena salah satunya dipengaruhi oleh karena tahun anggaran 2003 perhitungan anggaran hanya sampai 9 bulan.

Dalam upaya membiayai aktifitas pemerintahan, sumber biaya disamping diperoleh dari sumber pendapatan daerah sendiri, juga diperoleh dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari pemerintah. Penerimaan DAU tahun 2004 sebesar Rp 38.784.885.172,00 dan meningkat menjadi Rp 45.862.890.000,00 pada

tahun 2002 sebesar 118,2% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2004. atau mengalami kenaikan sebesar 18,2%.

Anggaran pengeluaran rutin APBD Kabupaten Bangka tahun 2002/2003 sebesar Rp 28.211.097.141,00 sedangkan realisasinya Rp 25.987.800.955,00 untuk anggaran pengeluaran rutin APBD Kabupaten Bangka (Induk) tahun 2003 sebesar Rp 24.609.914.525,00 sedangkan realisasinya Rp 24.067.181.446,00 dan untuk anggaran pengeluaran rutin APBD Kabupaten Bangka (Induk) tahun 2004 sebesar Rp 57.334.744.968,00 sedangkan realisasinya Rp 51.682.968.798,00.

Pengeluaran Rutin Kabupaten Bangka (Induk) dalam kurun 2 tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata Rp 8.5675.061.947,00/tahun atau mengalami kenaikan 32,96%/tahun.

Pengeluaran/Alokasi dana APBD Kabupaten Bangka untuk Dinas Pariwisata setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran, 2000 sejumlah, Rp 148.105.500,00
- b. Tahun Anggaran, 2001 sejumlah, Rp 935.594.400,00
- c. Tahun Anggaran, 2002 sejumlah, Rp 1.333.001.700,00
- d. Tahun Anggaran, 2003 sejumlah, Rp 3.774.426.500,00
- e. Tahun Anggaran, 2004 sejumlah, Rp 1.421.721.300,00

Sejak tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2003, alokasi dana APBD Kabupaten Bangka (Induk) untuk Dinas Pariwisata meningkat, bahkan pada tahun anggaran 2003 alokasi dana untuk Dinas Pariwisata cukup tinggi yaitu mencapai Rp 3.774.426.500,00 hal ini dikarenakan sampai dengan tahun anggaran 2003 Kabupaten Bangka masih membiayai sektor pariwisata di 22 Kecamatan.

termasuk Kecamatan-Kecamatan dalam Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Bangka Barat, yang merupakan Kabupaten hasil dari pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten, di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Potensi Daerah

a. Pertanian

Potensi pertanian disini dikelompokkan menjadi pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan. Produksi tanaman pangan tahun 2004 di Kabupaten Bangka (Induk) terdiri dari padi, ubi jalar, sayuran, buah-buahan dan kacang tanah. Produksi padi mencapai 4.176,10 ton; ubi jalar mencapai 699 ton; sayuran 8.900 ton; ubi kayu 4.734 ton; buah-buahan 72.552,5 ton dan produksi kacang tanah sebesar 177,3 ton. Dengan demikian tanaman pangan yang menjadi andalan adalah buah-buahan. Kecamatan Puding Besar merupakan kecamatan penghasil utama buah-buahan.

Dan secara terperinci produksi tanaman pangan menurut Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2004

Kecamatan	Produksi ons								Jumlah Total
	P a d i		Ubi Jalar	Ubi Kayu	Sayuran	Buah- buahan	Kacang Tanah	Kc. Kedele	
	Sawah	Ladang							
1. Sungailiat	5,6	481,8	77,0	745,0	1.237,0	2.176,0	144,0	-	4.866,4
2. Belinyu	-	81,4	20,0	407,0	768,1	319,4	4,8	-	1.600,7
3. Riau Silip	112,0	172,2	52,0	268,0	379,0	363,0	2,4	-	1.348,6
4. Bakam	1,1	414,6	83,0	700,0	477,7	2.343,0	2,4	-	4.021,8
5. Pemali	4,5	67,2	81,0	360,0	1.096,0	2.266,6	5,6	-	3.900,9
6. Merawang	12,9	874,2	173,0	363,0	1.875,7	21.412,4	2,5	-	24.713,
7. Mendo Barat	726,0	525,6	120,0	1.529,0	1.816,5	17.482,1	13,6	-	22.212,
8. Puding Besar	15,0	682,0	93,0	362,0	1.250,0	26.170,0	2,0	-	28,574,
J u m l a h	877,1	3.299,0	699,0	4.734	8.900,0	72.552,5	177,3	-	91.238,

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Bangka

b. Peternakan

Secara terperinci produksi hasil peternakan Kabupaten dan Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7

Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Bangka Tahun 2004

Kecamatan	Produksi Ekor							Jumlah Total
	Ayam Ras	Ayam Kampung	Itik	Kerbau	Sapi	Kambing	Babi	
1. Sungailiat	243.588	145.046	2.453	3	669	1.072	3.087	395.918
2. Belinyu	104.488	72.323	2.227	-	125	276	2.959	182.398
3. Riau Silip	70.600	54.477	1.227	-	80	124	2.269	128.777
4. Bakam	114.088	106.585	1.680	-	407	837	2.494	226.091
5. Pemali	279.650	173.215	3.960	4	479	1.256	4.079	462.643
6. Merawang	22.850	102.985	360	-	20	46	762	127.023
7. Mendo Barat	500	100.369	1.160	-	34	45	-	102.108
8. Puding Besar	11.788	69.831	160	-	11	25	367	82.182
Jumlah	847.552	824.831	13.227	7	1.825	3.681	16.017	1.707.140

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka

Produksi ternak unggas di Kabupaten Bangka terbanyak adalah ayam ras dengan jumlah populasi 847.552 ekor, sedangkan ternak besar yang paling banyak ternak babi yaitu 16.017 ekor.

c. Perkebunan

Produk hasil perkebunan tahun 2004 di Kabupaten Bangka terdiri dari lada, karet, kelapa sawit, cengkeh, dan kakao. Dan secara terperinci produksi hasil perkebunan menurut Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Produksi Hasil Perkebunan Kabupaten Bangka Tahun 2004

Kecamatan	Produksi(Ton)						Jumlah Total
	Lada	Karet	Kelapa Sawit	Kelapa	Cengkeh	Kakao	
1. Sungailiat	128,44	37,00	-	1.626,00	-	7,52	1.798,96
2. Belinyu	419,10	354,00	-	180,0	2,55	2,40	958,05
3. Riau Sitip	670,00	565,00	2.928,54	116,00	-	2,30	4.281,84
4. Bakam	1.158,00	248,00	82.773,25	145,00	-	-	84.324,25
5. Pemali	515,40	439,00	-	740,00	-	1,67	1.696,07
6. Merawang	928,70	1.073,00	18.106,45	73,00	-	1,65	20.182,80
7. Mendo Barat	1.192,81	3.592,00	90,00	72,00	-	0,08	4.946,89
8. Puding Besar	1,278,00	1.475,00	13.162,57	26,00	-	12,37	15.953,94
Jumlah	6.290,45	7.783,00	117.060,81	2.976,00	2,55	27,99	134.142,80

Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Disektor perkebunan, Kabupaten Bangka merupakan daerah penghasil kelapa sawit, tetapi kalau dilihat dari nilai ekonomis komoditi, maka komoditas lada merupakan pilihan utama untuk dikembangkan, karena harga jualnya sangat tinggi. Disamping itu wilayah ini sangat cocok untuk pengembangan budidaya lada.

d. Perikanan

Kabupaten Bangka dilihat dari wilayahnya, bagian utaranya merupakan Laut Natuna dan sebelah timurnya merupakan Selat Gaspar, sudah barang tentu mempunyai potensi yang tinggi untuk mengembangkan produksi perikanan laut. Hal ini dapat terlihat walaupun diwilayah ini banyak dijumpai sungai, tetapi produksi perikanan laut lebih besar sedangkan ikan air darat/tawar produksinya relatif kecil.

Produksi ikan laut tahun 20019.305,52 ton, sedangkan produksi ikan air darat/tawar hanya 7,6 ton. Sedangkan produksi udang cukup besar yaitu mencapai 127,50 ton.

e. Pertambangan

Pengembangan sumber daya alam, mineral dan energi yang potensial untuk diusahakan secara besar-besaran di Kabupaten Bangka setelah pemekaran adalah pertambangan timah.. Timah ini diproduksi hampir di semua wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Puding Besar, walaupun kecamatan ini mempunyai potensi tambang timah yang sangat besar. Sedangkan kecamatan penghasil timah terbesar adalah Kecamatan Belinyu, yaitu mencapai 7.785,70 ton dengan luas KID Eksplorasi 63.383 Ha. Penambangan timah ini terus berlangsung tanpa henti dan masih memiliki potensi yang lebih besar untuk dieksploitasi.

Untuk mengetahui produksi pertambangan timah yang menjadi unggulan utama Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9**KAWASAN DAN PRODUKSI KP. TIMAH KABUPATEN BANGKA**

TAHUN 2004

Kecamatan	Was KP. Eksploitasi Timah (Ha)	Produksi (Ton)
1. Sungailiat	20.115,50	2.140,30
2. Belinyu	63.382,00	7.785,70
3. Riau Silip	7.500,00	1.071,60
4. Bakam	-	161,10
5. Pemali	-	242,90
6. Merawang	1.208,00	386,40
7. Mendo Barat	903,00	1,50
8. Puding Besar	14.641,50	-
J u m l a h	107.723,00	11,789,50

Sumber Data : PT. Timah

f. Perhubungan

Kabupaten Bangka yang geografisnya dikelilingi Laut Natuna disebelah Utara dan Selat Gaspar disebelah Timur, maka transportasinya termasuk strategis. Untuk itu kelengkapan sarana dan prasarana perhubungan mempunyai peran yang sangat besar dalam menunjang pembangunan sektor-sektor lainnya.

Tabel 4.10
Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Bangka
Tahun 2002

Kecamatan	Kendaraan Bermotor			Kapal/Perahu Motor		Panjang Jalan (Km)		
	Roda 2	Roda 3	Roda 4	Kapal	Perahu Motor	Propinsi	Kabupaten	Desa
1. Sungailiat	13.059	47	1.516	380	136	23,10	130,73	47,10
2. Belinyu	6.055	3	201	19	258	10,00	104,67	17,85
3. Riau Silip	2.176	-	75	1	158	10,60	63,35	
4. Bakam	1.401	-	78	-	3	20,90	39,65	
5. Pemali	3.904	1	120	-	-	8,00	28,47	-
6. Merawang	3.293	-	159	1	26	25,60	57,80	37,26
7. Mendo Barat	2.256	-	2.256	89	250	17,75	69,83	-
8. Puding Besar	1.155	-	73	56	115	27,13	43,65	-
J u m l a h	33.299	51	4.478	546	946	143,08	538,15	102,2

Sumber Data : Dinas Parhubsenibud dan Dinas Kinpraswil

- *Perhubungan Laut*

Kapal/perahu yang melalui pelabuhan Belinyu tahun 2000 sebanyak 799, kapal/perahu dengan memuat barang sebanyak 68.215,33 ton dan barang yang dibongkar 32.799,58 ton. Sementara jumlah penumpang yang naik 50.326 orang dan 42.457 penumpang turun.

- *Perhubungan Darat*

Secara terperinci sarana dan prasarana perhubungan darat di Kabupaten Bangka (Induk) terperinci menurut kecamatan adalah seperti tertera pada tabel 4.10.

g. Telekomunikasi

Telekomunikasi Kabupaten Bangka (Induk) hingga tahun 2004 adalah 4.273 pelanggan telkom dan 29 pelanggan seluler. Sedangkan jasa telekomunikasi yang ada adalah 3 Kantor Pos, 27 Wartel, 4 Warnet dan 14 jasa kiriman.

h. Industri

Berdasarkan Data Bangka Dalam Angka 2003, jumlah industri di Kabupaten Bangka (Induk) tahun 2003 adalah di Kecamatan Sungailiat terdapat 4 industri besar yang menyerap tenaga kerja 204 orang, industri sedang 1 perusahaan dengan menyerap tenaga kerja 35, dan industri kecil berjumlah 14 perusahaan dengan tenaga kerja 1.452 orang, Kecamatan Belinyu terdapat 2 perusahaan besar dengan tenaga kerja 315 orang, industri sedang 1 perusahaan dengan menyerap tenaga kerja 100, dan industri kecil berjumlah 87 perusahaan dengan tenaga kerja 635 orang, Kecamatan Mendo Barat terdapat 1 perusahaan besar dengan tenaga kerja 128 orang dan 46 industri kecil dengan menyerap tenaga kerja 245 orang.

i. Perdagangan

Kabupaten Bangka (Induk) merupakan daerah potensi sumber daya alam yang sangat tinggi seperti timah, lada, hasil laut, pasir dan hasil hutan. Dengan adanya potensi alam tersebut, maka kegiatan perdagangan Kabupaten Bangka semakin pesat, apalagi dengan adanya pelabuhan laut di Belinyu, memudahkan untuk melakukan perdagangan baik ekspor maupun domestik.

Eksport komoditi laut, lada putih, logam timah, karet, pasir, kaolin terutama dengan tujuan negara-negara Asia dan Eropa.

j. Listrik dan Air Bersih

Tabel 4.11
Jumlah Pelanggan Listrik PLN dan Rumah Tangga
Kabupaten Bangka Tahun 2004

Kecamatan	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Jumlah Total
1. Sungailiat	2.863	720	3.583
2. Belinyu	2.647	3.680	6.327
3. Riau Silip	877	-	877
4. Bakam	239	15	254
5. Pemali	1.096	127	1.223
6. Merawang	4.377	-	4.377
7. Mendo Barat	3.819	1.569	5.388
8. Puding Besar	661	125	786
Jumlah	16.579	6.236	22.815

Sumber Data : Kantor Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2005

Jumlah pelanggan listrik PLN dan rumah tangga di Kabupaten Bangka tahun 2004, adalah seperti tertera pada tabel, 4.11 diatas.

k. Pendidikan

Penduduk Kabupaten Bangka usia sekolah (7 s/d 18 tahun) pada tahun 2000 berjumlah 64.263 orang, sedangkan yang bersekolah berjumlah 55.151 orang atau 85,82 % dan yang tidak sekolah berjumlah 9.112 orang atau 14,18 % penduduk tidak sekolah pada usia sekolah.

Tabel 4.12
Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah
Kabupaten Bangka Tahun 2004

Kecamatan	Usia Belum Sekolah (1 - 6 Th)	Usia Sekolah Tahun				Usia Tidak Sekolah	
		7 - 12		13 - 18		19-59	60 Tahun Keatas
		Sekolah	Tidak Sekolah	Sekolah	Tidak Sekolah		
1. Sungailiat	4.663	5.545	75	6.450	419	24.004	2.497
2. Belinyu	3.291	4.797	322	4.657	815	24.106	2.572
3. Riau Silip	1.948	2.261	146	2.786	842	8.607	650
4. Sakam	2.452	2.361	222	1.632	876	9.577	589
5. Pemali	2.503	3.091	118	3.712	299	16.717	1.061
6. Merawang	3.361	3.426	208	2.476	1.284	11.052	1.359
7. Mendo Barat	4.997	4.566	442	2.336	2.033	14.100	1.401
8. Puding Besar	2.391	2.304	151	2.751	860	6.945	681
J u m l a h	25.606	28.3511	1.684	26.800	7.4281	115.1081	10.8101

Sumber Data : Kantor Bappeda Kabupaten Bangka tahun 2004

Penduduk usia sekolah dasar di Kabupaten Bangka adalah 30.035 jiwa dan yang bersekolah mencapai 94,35 %, untuk sekolah SLTP dan SMTA berjumlah 34.228 jiwa dan yang bersekolah mencapai 78,30%.

Untuk mengetahui komposisi usia penduduk dan usia sekolah, secara terperinci di masing - masing Kecamatan adalah seperti tertera pada tabel 4.12 tersebut diatas.

Dalam upaya menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Untuk mengetahui fasilitas tersebut, dapat diperhatikan tabel dibawah ini

Tabel 4.13

Komposisi Penduduk Usia Sekolah dan Jumlah Sekolah Tahun 2004

Kecamatan	Sarana Pendidikan dan Penduduk Usia sekolah							Jumlah	
	SD	Usia SD	SLTP	Usia SMTP	SMTA	Usia SMTA	Usia PT	Sarana	Usia Sekolah/ Mahasiswa
1. Sungailiat	47	7.769	5	1.492	11	7.923	6.642	63	23.826
2. Belinyu	30	7.678	1	379	16	5.699	4.082	37	17.838
3. Riau Silip	20	5.253	2	409	-	1.815	1.975	22	9.452
4. Bakam	15	1.980	1	175	-	727	1.523	16	4.405
5. Pemali	10	5.865	17	3.444	2	1.780	1.923	29	13.012
6. Merawang	28	9.435	7	1.312	2	1.720	2.720	37	13.467
7. Mendo Barat	28	5.749	1	311	1	1.644	3.626	30	11.329
8. Puding Besar	12	5.180	-	-	-	777	1.695	12	7.652
Jumlah	190	48.909	34	7.522	22	20.365	24.186	246	100.981

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Bangka

Kabupaten Bangka tersedia fasilitas pendidikan yang berupa 190 SD dengan jumlah penduduk usia sekolah dasar 48.909. Ini berarti bahwa rasio SD terhadap penduduk usia SD adalah 0,39%. Atau setiap SD paling tidak mampu menampung 257 penduduk usia sekolah. Sedangkan kalau dilihat dari persebaran sarana SD ada yang terkonsentrasi di beberapa Kecamatan, sehingga ada Kecamatan yang terlalu banyak SD, tetapi jumlah penduduk usia sekolah agak sedikit seperti di Kecamatan Sungailiat yang memiliki SD 47 buah, sedangkan jumlah penduduk usia SD 7.769 orang, dan dilain pihak, kecamatan Merawang hanya memiliki SD 28 buah dengan jumlah penduduk usia SD 9.749 orang. Untuk fasilitas pendidikan SMTP, telah tersedia sarana SMTP yang berjumlah 34 buah, dengan jumlah penduduk usia sekolah SMTP adalah 7.522 orang. Rasio SN1"TP terhadap penduduk usia SMTA

adalah 0,45%. Atau setiap SMTA paling tidak mampu menampung 221 penduduk usia sekolah. Untuk fasilitas pendidikan SMTA, telah tersedia sarana SMTA yang berjumlah 22 buah, dengan jumlah penduduk usia sekolah SMTA. adalah 20.365 orang. Rasio SMTA terhadap penduduk usia SMTA adalah 0,11%. Atau setiap SMTA paling tidak mampu menampung 925 penduduk usia sekolah. Sedangkan jumlah penduduk usia perguruan tinggi 24.186 orang dan jumlah penduduk usia 19 tahun ke atas adalah 115.609 orang, sehingga rasio penduduk usia perguruan tinggi terhadap penduduk usia 19 tahun adalah 20,92%.

l. Agama

Mayoritas penduduk Kabupaten Bangka (Induk) beragama Islam. Oleh sebab itu sarana rumah ibadah di sini mayoritas adalah Masjid. Adapun Jumlah tempat peribadatan terdiri dari Masjid sebanyak 130 buah, Langgar 94 buah, Musholla 23 buah, Gereja 26 buah, kelenteng 31 buah, dan vihara 11 buah.

m. Kesehatan

Pemerintah daerah yang mempunyai fungsi pelayanan, maka dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk memenuhi pelayanan tersebut, Kabupaten Bangka memiliki 1 unit Rumah Sakit Umum, Puskesmas 10 unit, Puskesmas pembantu 29 unit, Klinik 7 Unit, dan dilengkapi apotik 3 unit. Sementara jumlah tenaga medis adalah 397 orang yang terdiri dari 39 orang dokter, 69 orang bidan, 211 orang perawat dan lain-lain 78 orang.

4. Obyek wisata dan Sarana Pendukung Kabupaten Bangka 2004

Tabel 4.14
Jumlah Obyek Wisata dan Sarana Pendukungnya
Kabupaten Bangka Tahun 2004

Kecamatan	Obyek Wisata		Penginapan			Tempat Makan	
	Wisata Alam	Wisata Buatan	Hotel	Losmen	Wisma/Villa	Restoran	Rumah Makan
1. Sungailiat	10	5	8	2	2	8	25
2. Belinyu	7	5	-	2	-	-	6
3. Riau Silip	4	-	-	-	-	-	3
4. Sakam	-	2	-	-	-	-	7
5. Pemali	1	1	-	-	2	-	-
6. Merawang	1	1	-	2	-	-	2
7. Mendo Barat	2	1	-	-	-	-	-
8. Puding Besar	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	10	15	8	6	4	8	43

Sumber Data : Dinas Pariwisata

Akomodasi Pariwisata di Kabupaten Bangka yang menjadi sumber pemasukan bagi Pendaratan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Hotel berbintang dan Hotel Melati. Pada tahun 2004 jumlah hotel beserta kamar yang tersedia untuk penginapan wisatawan :

- Hotel Parai Indah, dengan klasifikasi, Bintang 4, kapasitas 60 kamar
- Hotel Tanjung Pesona, dengan klasifikasi, Bintang 3, kapasitas 50 kamar
- Hotel City Garden, dengan klasifikasi, Melati 3, kapasitas 18 kamar
- Hotel Citra Sungailiat, dengan klasifikasi, Melati 3, kapasitas 16 kamar

- Hotel Teluk Uber, dengan klasifikasi, Melati 3, kapasitas 10 kamar
- Hotel Tri Mustika, dengan klasifikasi, Melati 1, kapasitas 9 kamar
- Hotel Sejati, Pondok Wisata, klasifikasi, Melati 1, kapasitas 31 kamar
- Wisma Flamboyant, dengan klasifikasi Melati 1, kapasitas 9 kamar

Selain jumlah hotel dan wisma tersebut diatas, masih terdapat tempat-tempat penginapan seperti : Losmen–losmen yang merupakan sumber pemasukan bagi Kabupaten Bangka, dalam bentuk retribusi dan pajak pembangunan satu.

Untuk Biro Perjalanan sampai dengan tahun 2004 di Kabupaten Bangka terdapat 5 (lima) biro perjalanan Wisata. Biro perjalanan wisata tersebut antara lain adalah : Bella Wisata, Orom Wisata, Avir Wisata, Hendrayan Wisata, dan Maniswati Tour.

Objek wisata pantai tersebar, hampir disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka. Selain objek dan akomodasi wisata tersebut diatas, terdapat pula objek wisata lainnya yang cukup menarik seperti : gunung Menumbing, gunung Maras dan objek wisata air panas di Pemali (Sungailiat). Objek wisata sejarah seperti Kota Kapur (Mendo Barat), makam Batin Tikal di desa Kimak (Merawang) dan wisata agama Islam yaitu ziarah ke kuburan keramat di desa Bakit (Jebus), agama Khatolik ada Goa Bunda Maria di Belinyu dan untuk agama Konghucu, ada vihara, sembahyang rebut, pekcun (tolak balak), wisata agro menyusuri perkebunan lada dan perkebunan sawit.

Daerah bekas pertambangan dan kapal-kapal keruk penambangan timah yang merupakan objek wisata yang dapat dikatakan unik. Selanjutnya ada objek wisata budaya berupa pertunjukan seni dan budaya Bangka tradisional (campak bedaek,

perang ketupat, mandi belimau, naber pantai, rebo kasan) serta acara-acara adat lainnya seperti pesta perkawinan dan perkawinan massal.

Wisata lingkungan (*eco-tourism*), menyusuri sungai Baturusa, menyusuri sungai Air Layang sampai ke Teluk Kelabat dengan keindahan hutan mangrove-nya. Khusus di Teluk Kelabat, disepanjang pantainya masih ditemui biota laut yang sudah langka seperti : kaco, simping dan sumbun (bahasa daerah/lokal), yang dapat dijadikan sebagai "Sea Food" yang cukup lezat.

Seperti daerah-daerah lainnya, Bangka juga memiliki masakan daerah yang beranekaragam. Tidak kalah indahnya dengan pantai Sanur (Bali), disekitar pantai Teluk Kelabat (Belinyu) bila waktu senja, para wisatawan dapat menikmati proses "Sunset" yang uniknya adalah warna matahari pada saat sunset tersebut karena berwarna merah. Disamping objek wisata pantai dan objek tersebut diatas di Bangka juga ada objek wisata bahari lainnya, seperti trumbu karang (coral reef), kapal tenggelam dengan muatan karunya, pulau-pulau seperti pulau Panjang dan pulau Semujur, pulau Nanas dan pulau Mengkubung serta pulau Tujuh, yang ekosistem karangnya mengelilingi pulau-pulau tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Strategi Yang Diterapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka Dalam Pengembangan Pariwisata

Kabupaten Bangka memiliki potensi wisata yang sangat menarik, seperti :

1. Pantai Tenggiri dibawah pengelolaan Hotel Parai dengan fasilitas kolam renang, lapangan tenis, restoran, diskotik, dan billiard. Obyek ini terletak 7 Km dari Kota Sungailiat.
2. Pantai Tanjung Pesona, yang merupakan pantai berbatu dan pantai landai untuk berenang, selain itu juga ada obyek wisata
3. Pantai Teluk Uber.

Dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah dan perubahan yang cepat, dan persaingan di bidang pariwisata, maka pemerintah Kabupaten Bangka melakukan pengembangan produk pariwisata, analisis berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bangka. Visi Kabupaten Bangka adalah **“Menjadikan Kabupaten Bangka Sebagai Andalan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Agro Industri dan Industri Maritim Melalui Pemberdayaan Potensi Daerah Secara Berkelanjutan Guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”** Sedangkan M I S I Kabupaten Bangka adalah, sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Meningkatkan kemampuan infrastruktur dasar.
4. Melaksanakan pembangunan yang berbasis kewilayahan dan berwawasan lingkungan.

5. Meningkatkan kemampuan daerah yang berbasis sektor unggulan untuk meningkatkan PAD serta pendapatan daerah.
6. Mendorong peningkatan investasi pihak swasta.
7. Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pelibatan masyarakat serta pengentasan kemiskinan.
8. Meningkatkan kinerja pemerintah dengan menerapkan prinsip Good Governance.

Pihak pemerintah Kabupaten Bangka mengestimasi apakah pengelolaan obyek pariwisata akan cukup tinggi untuk menghasilkan pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dalam analisis usaha obyek pariwisata bisnis ini, Kabupaten Bangka menggunakan analisis SWOT.

Karena pariwisata sebagai sektor yang bersifat lintas sektoral dimana menyangkut berbagai kepentingan publik yang luas dan kompleks, serta sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal, akan mengalami kesulitan jika pendekatan yang digunakan dengan perencanaan konvensional yang kurang memperhitungkan faktor-faktor lingkungan.

Dalam hubungan inilah maka penggunaan *strategie planning* dalam perencanaan pariwisata relevan dilakukan dengan asumsi bahwa perencanaan pariwisata disuatu daerah sebaiknya dibimbing oleh suatu visi tertentu berdasarkan mandat, misi dan tujuan tertentu dan diimplementasikan melalui pengembangan kegiatan serta potensi pariwisata, strategis yang dimiliki daerah setelah melakukan analisis faktor-faktor internal dengan eksternal. Disamping itu *strategie planning* memberikan pendekatan yang lebih berorientasi pada usaha untuk mengantisipasi

adanya perubahan yang langsung dengan cepat dimasa mendatang dan bagaimana mengatasinya dengan melakukan perubahan secara organisasi.

Analisa SWOT merupakan penggabungan analisis internal dan eksternal yang ditujukan untuk menentukan formulasi strategi perusahaan dalam bentuk alternatif strategi. Dari Matriks SWOT dapat dijelaskan menjadi 4 strategi, meliputi :

1. Strategi S-O, dimaksud agar kekuatan internal dapat digunakan untuk meraih peluang-peluang yang ada pada kekuatan eksternal. Strategi ini digunakan agar perusahaan lebih ekspensif dalam menjalankan operasionalnya sehingga diharapkan dapat ekspansi dan mencapai profit yang tinggi. Dari kekuatan dan peluang di atas dapat diidentifikasi :
 - a. Melengkapi sarana obyek pariwisata yang sedang bertumbuh,
 - b. Pemimpin pasar
 - c. Jenis wisata yang beragam
 - d. Dapat dipakai sebagai analisis pengembangan pariwisata
 - e. Memiliki pertumbuhan keuntungan yang fantastik
 - f. Memiliki kekuatan potensi daerah yang subur, pertumbuhan ekonomi
 - g. Dapat menggunakan fasilitas obyek wisata.
2. Strategi W-O, dimaksudkan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal perusahaan dengan pemanfaatan peluang-peluang eksternal yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu menerobos peluang untuk melakukan ekspansi penjualan obyek pariwisata. Dari kelemahan dan peluang di atas dapat diidentifikasi strategi sebagai berikut :
 - a. Transportasi antar daerah obyek wisata masih sulit.

- b. Potensi pariwisata yang kurang dapat dikembangkan karena keterbatasan APBD
 - c. Menghadapi persaingan yang luas di beberapa kota dalam pengembangan pariwisata.
3. Strategi S-T, dimaksudkan untuk mengurangi dampak yang timbul dari ancaman-ancaman dalam memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, sehingga strategi yang dilakukan adalah melakukan pelayanan dalam jangka pendek dan mengantisipasi ancaman yang akan timbul. Dari kekuatan dan ancaman tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut
- a. Adanya persaingan dengan obyek wisata daerah lain
 - b. Adanya isu terorisme di Indonesia
 - c. Politik yang tidak stabil
 - d. Banyaknya bencana alam
 - e. APBD yang tersedia sangat minim.
4. Strategi W - T, dimaksud untuk melakukan pertahanan dengan cara mengurangi kelemahan serta menghindari ancaman. Strategi ini dilakukan dengan melakukan perbaikan produk dan teknologi untuk mengikuti perkembangan pelayanan dari kelemahan dan ancaman dapat diidentifikasi strategi meliputi :
- a. Pertumbuhan yang kuat
 - b. Dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia
 - c. Dapat berkonsolidasi dengan daerah lain
 - d. Pertumbuhan yang baik
 - e. Dapat bersinergi dengan BUMD yang lain.

Dari keempat strategi di atas dapat dilakukan identifikasi perubahan maupun perbaikan produk untuk mengantisipasi produk pariwisata lebih berorientasi pada kepuasan konsumen maka dapat dilakukan pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan pelayanan yang merupakan syarat mutlak dalam bidang pariwisata.

Analisis SWOT, menurut *Robinson dan Pearce* (1997 : 231), dapat digunakan dengan berbagai cara untuk membantu analisa strategi. Cara yang paling lazim adalah memanfaatkan sebagai kerangka acuan yang mempedomani pembahasan sistematik tentang situasi perusahaan/organisasi dan alternatif produk yang dapat dipertimbangkan.

Menurut *Rangkuti* (1999 : 18-19), analisis SWOT adalah “Identifikasi berbagai faktor secara sistimatis untuk merumuskan strategi organisasi”, bahwa analisis ini pada intinya didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Maka dalam proses pengambilan keputusan strategik sebagai suatu rekayasa rencana dalam mencapai misi, dan misi yang sudah ditentukan tersebut seharusnya berada dalam parameter-parameter SWOT itu sendiri.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, berikut diuraikan gambar diagram analisis SWOT yang dapat memberikan ilustrasi peluang dan ancaman kunci secara sistematik dibandingkan dengan kekuatan dan kelemahan intern dengan rancangan yang terstruktur. Sasaran adalah mengidentifikasi satu dari empat pola yang menyesuaikan situasi intern dan ekstern perusahaan/organisasi. Pola-pola tersebut dapat digambarkan dalam diagram pada halaman berikut :

Diagram 4.6
Matrik Analisis SWOT



(sumber *Robinson*, 1997 : 234)

Sel 1 : Adalah situasi yang paling disukai, dalam hal ini perusahaan/organisasi menghadapi beberapa peluang lingkungan dan banyak kekuatan yang mendorong dimanfaatkannya peluang-peluang tersebut. Situasi itu menyarankan langkah strategi yang agresif dalam memanfaatkan situasi yang menguntungkan.

Sel 2 : Dalam situasi menghadapi ancaman, namun masih memiliki kekuatan internal tertentu yang dapat diandalkan. Saran untuk ini adalah strategi diversifikasi atau upaya-upaya baru masih memungkinkan.

Sel 3 : Dalam situasi menghadapi peluang-peluang yang impresif tetapi dikendalikan/dihambat oleh kelemahan-kelemahan intern. Saran untuk situasi demikian adalah difokuskan pada strategi meniadakan kelemahan intern dengan strategi berbenah diri agar efektif memanfaatkan peluang-peluang yang muncul.

Sel 4 : Merupakan situasi yang tidak menguntungkan. Situasi ancaman dari luar yang besar, sementara posisi intern relatif sangat lemah. Saran untuk menghadapi situasi ini adalah dengan strategi defensif.

Setelah semua informasi yang dipandang cukup berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan/organisasi, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan informasi tersebut. Maka untuk memudahkan dalam melakukan identifikasi perlu disusun Matrik Faktor-faktor strategi eksternal, dengan metode sebagai berikut :

- a. Menyusun/mengisi dalam kolom 2 (peluang dan ancaman).
- b. Memberi bobot masing-masing faktor dalam kolom 3 mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis.
- c. Menghitung skala (dalam kolom 4) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nilai skala untuk faktor peluang tersebut positif (peluang yang semakin besar diberi skala 5, tetapi jika peluangnya kecil diberi skala 1). Pemberian nilai

- skala ancaman adalah kebalikannya. Misalnya, jika nilai ancamannya sangat besar, skalanya adalah 1. Sebaliknya, jika nilai ancamannya sedikit skalanya 3.
- d. Kalikan bobot pada kolom 3 dengan skala pada kolom 4, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 5. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 5,0 (*outstanding*) sampai dengan 1,0 (*poor*).
 - e. Gunakan kolom 6 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
 - f. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 5), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya.

Analisis Peluang dan Ancaman

Analisis ETOP (*Environmental Threats Oppartunites Profile*) untuk mengetahui pengaruh lingkungan luar, baik memberikan peluang maupun ancaman. Dari analisis ini dilakukan penilaian terhadap unsur-unsur ancaman, sebagaimana tersebut pada tabel 4.15.

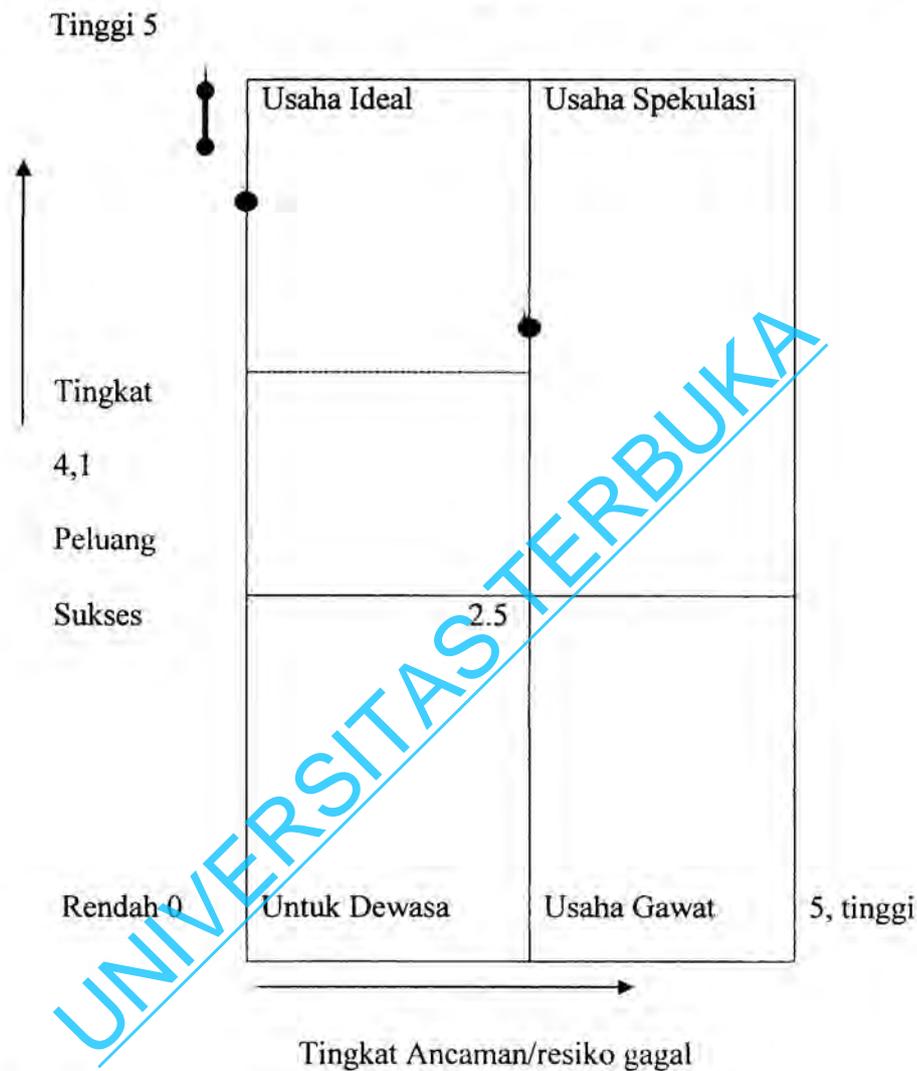
Tabel 4.15
Unsur-unsur Peluang – Ancaman

No.	Uraian	Bobot	Skala	Nilai	Keterangan
1	Peluang				Skala
	1. Pertumbuhan yang kuat	0.15	5	0.75	1. Sangat kurang berpeluang
	2. Dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia	0.20	4	0.80	2. Kurang berpeluang
	3. Dapat menkonsolidasi dengan daerah lain	0.15	5	0.75	3. Agak berpeluang
	4. Pertumbuhan yang lebih baik	0.20	5	1.00	4. Berpeluang
	5. Dapat bersinergi dengan BUMD	0.20	4	1.80	5. Sangat berpeluang
2	Jumlah	1.00		4.1	
3	Ancaman				Skala
	1. Adanya persaingan dengan obyek wisata lain	0.15	2	0.30	1. Sangat Kurang
	2. Adanya isu terorisme Di Indoensia	0.20	2	0.40	Mengancam
	3. Politik yang tidak stabil	0.25	2	0.50	2. Kurang mengancam
	4. Banyaknya bencana alam	0.20	1	0.20	3. Agak mengancam
	5. APBD yang tersedia sangat minim	0.20	1	0.20	4. Mengancam
4	Jumlah	1.00		1.60	5. Sangat Mengancam
5	Peluang – Ancaman	4.1-1.60		2.5	

Berdasarkan tabel 4.15. maka analisis peluang dan ancaman bisnis sebagai berikut :

Diagram 4.7

Matrik Kombinasi Peluang Ancaman Bisnis Pariwisata



Analisa Kekuatan dan Kelemahan Bisnis

Untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal Kabupaten Bangka Induk terhadap pesaing digunakan analisis SAP (*Strategic Advance Profile*) sebagaimana tersebut pada tabel 4.16

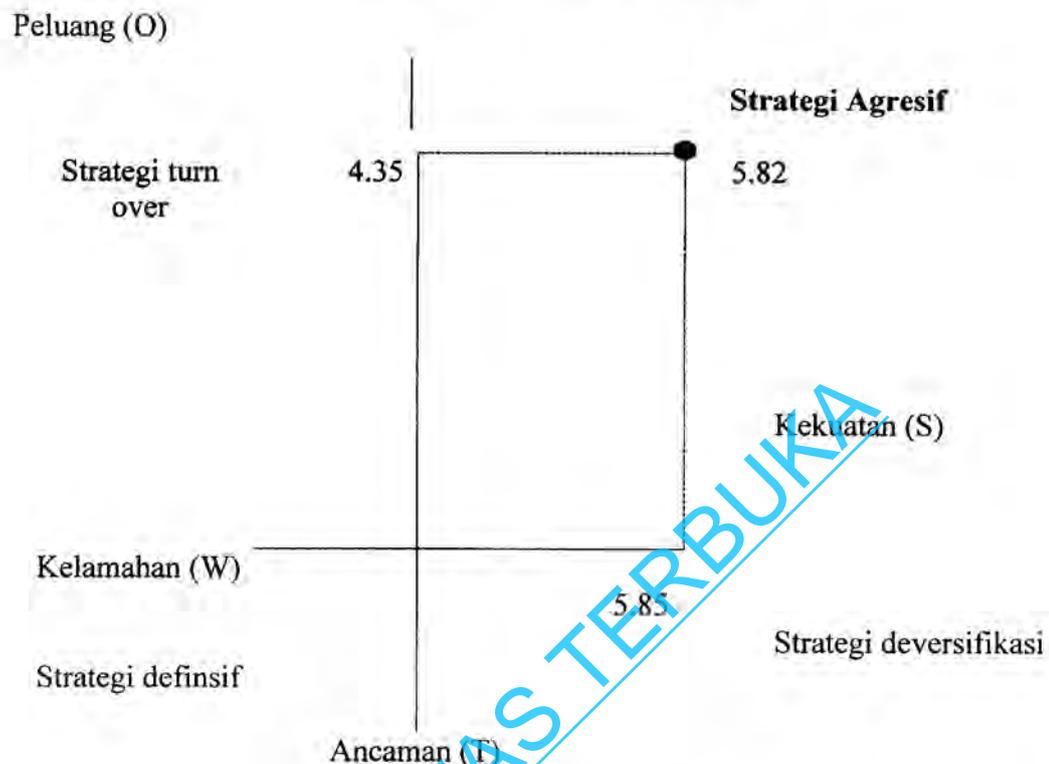
Tabel 4.16.
Kekuatan dan Kelemahan dari Lingkungan Internal
Kabupaten Bangka Terhadap Pesaing

No	Uraian	Bobot	Skala	Nilai	Keterangan
1	Kekuatan				Skala
	1. Melengkapi dan substitusi dari sarana dan prasarana obyek pariwisata	0.20	5	1.00	1. Sangat kurang kuat
	2. Pemimpin pasar	0.25	4	1.00	2. Kurang kuat
	3. Jenis wisata yang beragam	0.15	4	0.60	3. Agak kuat
	4. Dapat dipakai sebagai analisis pengembangan pariwisata	0.25	5	1.25	4. Kuat
	5. Memiliki pertumbuhan keuntungan yang fantastil	0.15	4	0.60	5. Sangat kuat
	6. Memiliki kekuatan potensi daerah yang subur, pertumbuhan ekonomi	0.20	4	0.80	
	7. Dapat menggunakan fasilitas obyek wisata	0.15	4	0.60	
2	Jumlah	1,00		5.85	
3	Kelemahan				Skala
	1. Transportasi antar daerah obyek wisata masih sulit	0.20	3	0.60	1. Sangat kurang lemah
	2. Potensi pariwisata yang kurang dapat dikembangkan karena keterbatasan APBD	0.25	2	0.50	2. Kurang lemah
	3. Menghadapi persaingan yang luas di beberapa kota pariwisata	0.20	2	0.40	3. Agak lemah
					4. Lemah
					5. Sangat lemah
4	Jumlah	1,00		1.50	
5	Kekuatan-Kelemahan		5.85 -1.50	4.35	

Dari analisa ETOP dan SAP, maka dapat diketahui posisi Kabupaten Bangka Induk hasil analisis ETOP, dimana peluang (O) ancaman (T) = ± 4.35 dan hasil analisis SAP, dimana kekuatan (S) - kelemahan (W) = ± 4.35 , maka berdasarkan diagram SWOT, posisi strategi agresif berada dalam kuadran 1 yang mendukung usaha strategi yang agresif, sebagaimana tersebut pada gambar 4.3.

Diagram 4.8

Matrik Usaha Strategi Agresif



Dari strategi di atas, maka strategi yang dikembangkan pada Kabupaten Bangka Induk adalah strategi *defensif* (pengembangan produk) dan strategi *agresif* (pengembangan pasar). Melalui strategi pengembangan produk, Kabupaten Bangka mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Bangka, sedangkan melalui strategi pengembangan pasar, pemerintah daerah melakukan promosi terhadap kekayaan wisata Bangka melalui media masa dan media elektronika.

Dalam strategi pengembangan produk pariwisata harus melakukan inovasi baru, meningkatkan kualitas produk sehingga produknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mempunyai kualitas atau sesuai segmen pasar yang dilayani. Produk

yang dihasilkan harus mampu memenuhi standar yang ditetapkan baik jumlahnya maupun mutunya, disamping itu juga mempunyai ciri kekhasan sehingga selalu tertanam dibenak para masyarakat. Sedangkan strategi pengembangan pasar, harus dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan melaksanakan penegalan obyek pariwisata yang mendekatkan ke konsumen, melalui promosi yang gencar.

Selain strategi, Kabupaten Bangka melakukan gebyar pariwisata, yaitu dengan melakukan pengenalan obyek pariwisata di malam acara pemberian santunan dan bantuan pada anak yatim piatu dan fakir miskin. Dengan dilakukannya gebyar wisata, maka masyarakat akan lebih menegnal ragam dan jenis serta tempat pariwisata di Kabupaten Bangka.

Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan organisasi yang menggunakan **Metode Analisis SWOT**, menurut pendapat penulis, analisis yang dilakukan terhadap lingkungan organisasi pemerintah Kabupaten Bangka, terutama Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut :

Lingkungan Internal :

1. Kekuatan (***Strength***)

- a. Tersedianya sumber daya alam yang memadai di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan serta pariwisata;
- b. Tersedianya sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup;
- c. Adanya komitmen aparatur pemerintahan untuk menyelenggarakan prinsip-prinsip *Good Governance*;
- d. Adanya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan;

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Masih lemahnya profesionalisme aparatur ;
- b. Lemahnya daya saing produk lokal ;
- c. Keterbatasan sumber dana pembangunan ;
- d. Belum membudayanya transparansi dilingkungan pemerintah ;
- e. Motivasi kerja yang belum optimal ;
- f. Keterbatasan sarana dan prasarana.

Lingkungan Ekternal

1. Peluang (*Opportunity*)

- a. Terbukanya pasar dunia untuk komoditas pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- b. Adanya otonomi daerah berupa kewenangan untuk mengelola pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan bagi daerah;
- c. Adanya minat calon wisatawan nusantara dan manca Negara untuk berkunjung;
- d. Dukungan investor baik lokal maupun luar;

2. Ancaman (*Threats*)

- a. Dampak negatif dari krisis moneter yang berkepanjangan;
- b. Masih ada indikasi praktek Korupsi dan Nepotisme;
- c. Krisis kepercayaan dunia Internasional kepada Indonesia yang berimbas kepada Kabupaten Bangka;

- d. Kerusakan lingkungan akibat perambahan hutan dan penambangan tanpa izin;
- e. Beberapa persoalan sosial belum terpecahkan secara tuntas, seperti :
Mantan Karyawan Timah, PT. Sumarco Makmun Indah dan Tambang Inkonvensional (T.I).

Berdasarkan pendekatan SWOT di atas jadi dapat di simpulkan analisis selanjutnya adalah menentukan tingkat masalah terpenting (urgensi) dan dampak potensial serta skala prioritas, yang merupakan hasil dari analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai faktor penentu keberhasilan organisasi, faktor-faktor tersebut adalah :

1. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan kelautan dan pariwisata.
2. Tersedianya sumber daya aparatur yang professional dan bebas KKN.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi pelayanan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Optimalisasi penerimaan daerah untuk mendukung kemandirian pembiayaan pemerintah.

Tujuan strategik selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah dirumuskan. Sedangkan sasaran strategik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses perencanaan strategik yang dirumuskan untuk masing-masing tujuan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Perkembangan Pariwisata Kabupaten Bangka

Seperti diketahui bahwa Kabupaten Bangka adalah salah satu dari sekian banyak Kabupaten yang mengalami pemekaran daerah yang berkaitan dengan penerapan Desentralisasi di Indonesia, tidak tertutup kemungkinan adanya persaingan yang ketat yang berpengaruh. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk lebih efektif dalam memasarkan produk pariwisatanya dengan mengkombinasikan seluruh kegiatan atau penetrasi pasar. Walaupun demikian Kabupaten Bangka Induk dalam melakukan strategi penetrasi pasar juga mengalami hambatan. Bentuk dari hambatan itu dapat berupa hambatan dari dalam organisasi (internal) maupun hambatan yang berasal dari luar pemerintah (eksternal). Oleh karena itu pemerintah berupaya dengan segala cara agar produknya secara luas dapat dikenal masyarakat dan dapat bersaing dengan daerah lain.

Dalam pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bangka, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal yang berpengaruh terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka antara lain :

- a. Sumber daya manusia, merupakan faktor pelaksana yang langsung berhubungan dengan upaya pengembangan obyek pariwisata. Oleh karena itu sumber daya manusia dalam hal ini aparatur Pemerintah Daerah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas harus memadai. Kurang memadainya jumlah aparatur daerah

menyebabkan kegiatan yang dilakukan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, demikian halnya dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur daerah akan berpengaruh terhadap kinerjanya, sehingga akan berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

b. Anggaran yang memadai

Anggaran atau dana merupakan sumber utama untuk mengembangkan program pariwisata. Tanpa adanya dana yang memadai, maka program kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah/Dinas Pariwisata tidak dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu dana merupakan faktor penting dalam pengembangan pariwisata dan selama 5 tahun terakhir ini Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk Dinas Pariwisata Tahun 2000 sejumlah Rp 148.105.500,00, Tahun 2001 sejumlah Rp 935.594.400,00, Tahun 2002 sejumlah Rp 1.333.001.700,00, Tahun 2003 sejumlah Rp 3.774.426.500,00 dan Tahun 2004 sejumlah Rp 1.421.721.300,00 memang terjadi penurunan oleh karena Pemerintah Daerah Bangka mempunyai kewajiban untuk membantu Daerah Kabupaten pemekaran selama 3 (tiga) tahun yang setiap tahun sejumlah Rp 1 Millyar. Untuk 3 (tiga) daerah pemekaran yaitu Bangka Barat, Bangka Selatan dan Bangka Tengah.

c. Komunikasi yang harmonis antar unit kerja Dinas Pariwisata

Komunikasi yang harmonis merupakan faktor penting dalam organisasi. Dengan terciptanya komunikasi yang harmonis antar unit kerja, maka akan tercipta iklim kerja yang baik, sehingga akan mendukung kelancaran tugas-tugas yang

dilaksanakan para pegawai. Oleh karena itu komunikasi merupakan faktor penting dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

d. Sarana dan Prasarana yang memadai.

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung terhadap kelancaran kegiatan yang dilaksanakan. Dengan rendahnya atau kurang memadainya sarana pendukung akan menyebabkan kegiatan yang dilakukan kurang lancar. Sarana dan prasarana ini dapat berbentuk sarana transportasi, jalan-jalan, fasilitas umum, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam rangka mendukung kegiatan yang dilakukan, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Pearce and Robinson, 1997, mengemukakan bahwa terdapat tiga bahan pokok bagi keberhasilan suatu strategi, yaitu : *pertama*, strategi harus *konsisten* dengan kondisi lingkungan persaingan, artinya strategi harus mampu memanfaatkan peluang yang ada atau yang diperkirakan akan ada dan meminimalkan dampak dari ancaman-ancaman besar. *Kedua*, strategi harus *realistik*, dalam hal kemampuan *intern*, dengan kata lain pemanfaatan peluang harus didasarkan tidak hanya pada peluang itu sendiri, melainkan juga pada kekuatan *intern*. *Ketiga*, strategi harus dilakukan secara cermat.

Masih berkaitan dengan pengertian diatas maka penilaian *intern* yang mendalam menjadi sangat penting dalam pengembangan strategi yang berhasil. Untuk itu pertimbangan yang cermat mengenai kekuatan dan kelemahan sebagai pencerminan kondisi lingkungan internal perlu dilakukan penilaian yang obyektif.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka antara lain :

a. Kemampuan untuk bersaing dengan obyek wisata Daerah lain masih kurang.

Melihat persaingan obyek wisata daerah lainnya, maka faktor kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Bangka untuk melakukan daya saing dengan obyek wisata daerah lain merupakan hal yang sangat penting. Apabila kemampuan maupun kemauan pemerintah dalam menerapkan strategi bersaing di bidang pariwisata tidak diterapkan, maka pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka kurang berhasil.

b. Faktor keamanan

Keamanan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi pengembangan pariwisata. Dengan kondisi keamanan yang stabil di daerah Kabupaten Bangka, maka akan menjadi daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan ke daerah Bangka.

c. Faktor Politik yang stabil

Dengan kondisi politik yang stabil dan aman, maka akan mempengaruhi perpariwisataan di Kabupaten Bangka. Dengan kondisi politik yang stabil, para investor atau toris baik lokal maupun internasional, tidak takut untuk datang atau berkunjung ke Kabupaten Bangka.

d. Koordinasi dengan Instansi terkait

Koordinasi merupakan fungsi manajemen yang sangat penting dalam organisasi. Dengan adanya koordinasi di bidang pariwisata dengan instansi terkait, maka akan menunjang pengembangan pariwisata.

Pihak-pihak lain yang berkompeten dan berkaitan secara dekat serta mempengaruhi kegiatan manajemen strategik adalah sangat penting. *Pearce and Robinson, 1997*, bahkan dalam manajemen strategik mempunyai perhatian khusus kepada aspek eksternal baik pada dimensi lingkungan jauh maupun lingkungan dekat. Oleh karena lingkungan dekat inilah yang dimaksud sebagai lingkungan pihak – pihak yang berkepentingan.

Sebagai suatu kegiatan manajemen yang menyeluruh, maka ancangan pengenalan pihak – pihak berkepentingan (*stakeholders*) sangat menentukan dan mempengaruhi strategi yang akan dilakukan organisasi (Dinas Pariwisata) Kabupaten Bangka.

Kepariwisataan adalah kegiatan yang melibatkan interaksi sosial masyarakat, dengan demikian kepariwisataan tidak dapat dipandang hanya dengan peramalan yang mengandalkan indikator – indikator ekonomi saja.

Karena interaksi yang ada didalamnya sangat kompleks, yakni terdapatnya kecenderungan – kecenderungan sosial serta sikap – sikap masyarakat yang mendasarinya. Kepariwisataan juga sangat dipengaruhi oleh perubahan – perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Tata nilai sikap, dan budaya masyarakat sangat erat hubungannya dengan kepariwisataan itu sendiri, seperti sikap dan budaya ramah dan tradisional dari

masyarakat Kabupaten Bangka, mencerminkan kebudayaan yang baik, merupakan aset juga bagi pariwisata, maka lingkungan sosial budaya serta perubahan – perubahan yang terjadi merupakan indikator peluang maupun ancaman dimasa – masa mendatang.

3. Besarnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD dan APBD Kabupaten Bangka

Kabupaten Bangka adalah merupakan kabupaten yang mengalami pemekaran, berkaitan dengan penerapan Desentralisasi di Indonesia. Oleh karena itu faktor-faktor yang dominan yang harus dilakukan Pemda Bangka dalam mengelola potensi daerahnya, seperti meningkatkan infrastruktur, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melaksanakan pembangunan yang berbasis kewilayahan dan berwawasan lingkungan dalam pembangunan pariwisata.

Pengelolaan yang baik dan terarah terhadap pengembangan pariwisata ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi PAD, dan berdampak positif terhadap sosial ekonomi, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sampai saat ini kunjungan wisatawan Mancanegara maupun Nusantara cukup baik, yaitu :

Tahun, 2000, Wisman, 554, Wisnus, 64.419, Jumlah, 64.973 Orang ;

Tahun, 2001, Wisman, 610, Wisnus, 70.961, Jumlah, 71.471 Orang ;

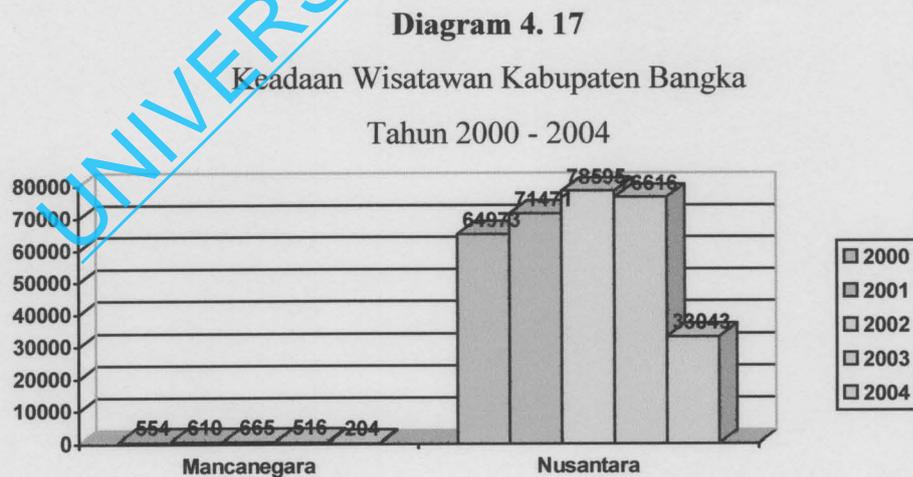
Tahun, 2002, Wisman, 665, Wisnus, 77.930, Jumlah, 78.595 Orang ;

Tahun, 2003, Wisman, 516, Wisnus, 76.100, Jumlah, 76.616 Orang ;

Tahun, 2004, Wisman, 204, Wisnus, 32.839, Jumlah. 33.043 Orang;

Selama tahun 2003 dan 2004, terlihat angka menurun untuk Wisatawan mancanegara maupun Wisatawan Nusantara, hal ini merupakan dampak pemekaran Kabupaten Bangka, menjadi 4 (empat) Kabupaten, sehingga untuk Kabupaten Bangka tinggal 8 Kecamatan, dan situasi ekonomi masyarakat agak lesu, keadaan keamanan negara Indonesia yang kurang kondusif, sehingga berimbas sampai ke daerah termasuk Kabupaten Bangka. Sedangkan kontribusi pariwisata untuk PAD hanya berasal dari pajak dan retribusi, yaitu Pajak Hotel dan Restoran, pajak hiburan, retribusi meja billiard serta retribusi tempat rekreasi dan olah raga. Pajak Hotel dan Restoran sangat tergantung kepada Wisatawan Mancanegara, karena merekalah yang menggunakan Hotel dan Restoran pada lokasi Obyek Wisata di Kabupaten Bangka tersebut. Sedangkan Wisatawan Nusantara (lokal) hanya rekreasi atau berlibur saja tidak pernah menyewa hotel.

Untuk dapat melihat perkembangan pariwisata dan PAD dapat dilihat pada diagram berikut ini :

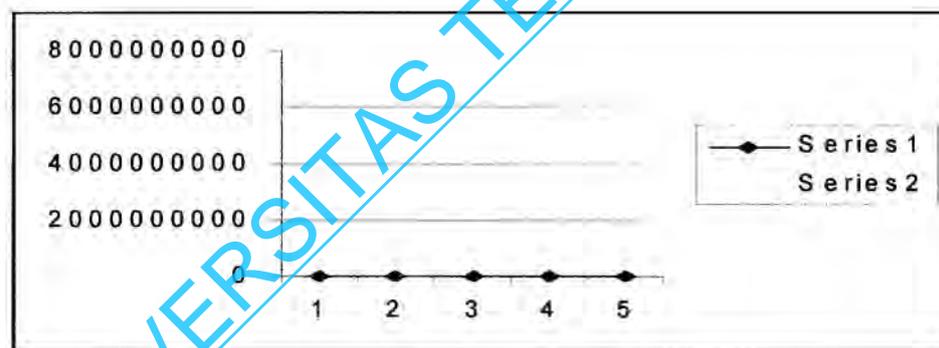


Sumber : BPS Kabupaten Bangka (Sumber table 4.17. Lampiran)

Tabel 4.18
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2000-2004
Kabupaten Bagka

Tahun	PAD	Peningkatan/ Penurunan
2000	4.222.088.293	
2001	4.537.369.832	315.281.539
2002	4.609.370.692	72.000.860
2003	4.889.257.518	279.886.826
2004	6.736.862.116	1.847.604.598
Rata-rata	4.998.989.690	502.954.765

Sumber : Kabupaten Bangka



Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dari Rp 4.222.088.293,00 pada tahun 2000 menjadi sebesar Rp 4.222.088.293,00 atau meningkat sebesar Rp 315.281.539,00 sedangkan pada tahun 2001 dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 4.537.369.832,00 naik sebesar Rp 72.000.860,00 atau Anggaran Penerimaan Daerah total pada tahun 2002 sebesar Rp 4.609.370.692,00 untuk tahun 2002 terjadi peningkatan dari

Rp 4.609.370.692 menjadi sebesar Rp 4.889.257.518,00 atau naik sebesar Rp 279.886.826,00 sedangkan tahun 2003 terjadi peningkatan yang positif sebesar Rp 4.889.257.518,00 menjadi sebesar Rp 6.736.862.116,00 atau naik sebesar Rp 1.847.604.598,00 dengan demikian bila melihat hasil rata-rata selama 5 (lima tahun) 2000-2004 Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Daerah sebesar Rp 4.998.989.690,00 dengan rincian terlampir.

Berdasarkan hasil pengolahan data untuk Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Induk tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.19
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 Kabupaten Bangka Induk Tahun 2000-2004

Tahun	APBD	Peningkatan/ Penurunan
2000	67.758.075.726	
2001	98.673.037.804	30.914.962.078
2002	94.415.619.290	(4.257.418.514)
2003	67.758.075.726	(26.657.543.564)
2004	98.675.037.804	30.916.962.078
Rata-rata	85.455.969.270	

Sumber Data : Bagian Keuangan Setda Bangka

Penerimaan dari Pajak Hotel dan Restoran tahun 2000, sebesar Rp 119.033.207,00 atau 100,02 %, tahun 2001, sebesar Rp 314.054.236,00 atau 125,62 %, tahun 2002, sebesar Rp 329.102.807,60, atau 109,70%, tahun 2003 sebesar Rp 313.922.701,00 atau 101,27 %, dan tahun 2004 sebesar Rp 262.500.000,00 mengalami penurunan penerimaan oleh karena pada tahun 2004 tersebut, Kabupaten Bangka menerima pemasukan hanya dari 8 (Kecamatan) pasca pemekaran Kabupaten (UU Nomor : 5 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten). Namun penerimaan terrealisasi sebesar Rp 337.557.676,00 atau sama dengan 128,59 %.

Untuk penerimaan dari, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, untuk tahun 2000, sebesar Rp 10.655.500,00 atau sama dengan 100,02 %, untuk tahun 2001, sebesar Rp 19.375.550,00 atau sama dengan 113,83%, untuk tahun 2002, sebesar Rp 20.910.000,00 atau 83,64 %, selama tahun 2003 sebesar Rp 17.700.000,00 atau sama dengan 70,80 %, dan penerimaan tahun 2004 sebesar Rp 27.774.000,00 atau setara dengan 111,10 %.

Sedangkan untuk penerimaan dari Pajak Hiburan, untuk tahun 2000 sebesar Rp 123.918.069,00 atau 132,18 %, untuk tahun 2001, sebesar Rp 50.178.750,00 atau 101,42 %, untuk tahun 2002, sebesar Rp 50.718.750,00 atau sama dengan 101,44%, dan untuk tahun 2003, sebesar Rp 57.764.250,00 atau sama dengan 115,53 %, dan untuk tahun 2004, sebesar Rp 65.213.600,00 atau sama dengan 118,57 %, dengan demikian khusus pajak hiburan tersebut setiap tahunnya meningkat, baik dari segi penetapan targetnya maupun penerimaannya sekaligus dalam bentuk riil

dan persentasenya. Untuk jelasnya kontribusi sektor pariwisata Kabupaten Bangka sebagaimana tertera pada tabel 4.20 berikut ini :

Tabel 4.20
Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata
Terhadap PAD dan APBD Kabupaten Bangka
Tahun 2000 - 2004

NO	JENIS PENDPT/ T. ANG.	PARIWISATA (Rp)	PAD (Rp)	APBD (Rp)	% PARIWISATA	
					PAD	APBD
1	2000	253.605.776	4.222.088.293	67.758.075.726	6,00	0,37
2	2001	383.608.536	4.537.369.832	98.673.037.804	8,45	0,38
3	2002	400.731.557,60	4.609.370.692	94.415.619.290	8,69	0,42
4	2003	389.386.951	4.889.257.518	67.758.075.726	7,96	0,57
5	2004	430.545.726	6.736.862.116	98.675.037.804	6,39	0,43
Rata -rata		1.857.878.456,60	24.994.948.451	427.279.846.350	7,43	0,43

Sumber Data : Bagian Keuangan Setda Bangka

Dari tabel 4.20 diatas menggambarkan bahwa penerimaan sektor pariwisata fluktuatif yaitu tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, mengalami kenaikan namun pada tahun 2003 mengalami penurunan dan pada tahun 2004 terjadi kenaikan yang cukup berarti.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2000 sampai dengan 2004 cenderung meningkat, hal ini sesuai dengan kebutuhan pembangunan meningkat. Kondisi kontribusi yang fluktuatif disatu sisi dan disisi lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang cenderung meningkat berimplikasi terhadap proporsi kontribusi

sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tahun 2000 sebanyak 6% dan meningkat tahun 2001 sebanyak 8,45% dan tahun 2002 sebanyak 8,69%. Pada tahun 2003 dan 2004 mengalami penurunan yaitu tahun 2003 hanya 7,96% dan tahun 2004 turun menjadi 6,39%.

Demikian pula halnya dengan sumbangan sektor pariwisata terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengalami kondisi yang sama yaitu selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, sumbangan sektor pariwisata terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami peningkatan yaitu tahun 2000 sebesar 0,37%, tahun 2001 0,38%, tahun 2002 0,42% dan tahun 2003 0,57% serta tahun 2004 mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 0,43% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka. Melihat kondisi demikian target kontribusi 25% sangat jauh dari harapan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian utamanya dalam strategi pengembangan Pariwisata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka sebagai penggambaran atau fenomena yang terjadi pada lingkungan internal organisasi maupun lingkungan eksternal organisasi maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, dilakukan penyesuaian Misi dengan struktur organisasi organisasi (Dinas Pariwisata) Kabupaten Bangka, hal ini perlu dilakukan mengingat misi yang ditetapkan adalah *ideal* dalam arti lebih cenderung berdimensi makro daerah.

Seharusnya misi organisasi dimaksudkan agar cakupannya lebih spesifik serta disesuaikan dengan kondisi dan potensi Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka.

Kedua, memantapkan peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka, tingkatkan koordinasi baik dalam lingkup lokal (intern Kabupaten), maupun dalam lingkup regional (antar Kabupaten/ Kota sekitarnya).

Ketiga, Strategi yang dikembangkan oleh Kabupaten Bangka dalam hal ini Dinas Pariwisata, adalah strategi *defensif* (pengembangan produk) dan strategi *agresif* (pengembangan pasar). Melalui strategi produk, Kabupaten Bangka mengembangkan potensi wisata yang ada sekarang ini, sedangkan melalui strategi pasar, pemerintah daerah bersama-sama Dinas Pariwisata Propinsi dan Pusat melakukan promosi terhadap asset/kekayaan wisata Bangka, melalui media massa dan media elektronika.

Selain strategi diatas, Dinas Pariwisata melakukan materi saran antara lain :

- a. Melakukan program pendidikan dan keahlian kepariwisataan.
 - b. Penyelarasan antara strategi/arahan kebijakan, untuk mewujudkan pemasaran yang proaktif.
 - c. Memberikan informasi yang jujur (*information credible*).
1. Para Pegawai Dinas Pariwisata kurang mempunyai keahlian dan kurang terampil, kondisi demikian ini menunjukkan atau berimplikasi pada tingkat profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia yang rendah serta kurang keahlian/trampil dalam menghadapi era perubahan/globalisasi, namun hal ini disebabkan pelatihan dan kursus keterampilan yang dilakukan sangat terbatas. Sehingga pada saat melakukan pemasaran dan tatap muka dengan masyarakat/para wisatawan, petugas pariwisata tersebut tidak dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk menciptakan daya tarik terhadap setiap produk pariwisata yang dikembangkan, seperti memberikan informasi penting yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti belum adanya pusat informasi Pariwisata, pada era perubahan/globalisasi sekarang jelas memerlukan SDM yang berkualitas.
 2. Berdasarkan pada kondisi dan kontribusi sektor pariwisata Kabupaten Bangka sampai dengan saat ini masih jauh dari harapan, maka pembangunan pariwisata memprioritaskan kepada peningkatan infrastruktur, sumberdaya manusia, serta melaksanakan pembangunan yang berbasis kewilayahan dan berwawasan lingkungan. Pariwisata yang menjadi salah satu sektor andalan Kabupaten

Bangka ke depan harus mendapat perhatian yang khusus dan serius dalam penanganannya.

B. Rekomendasi

Mengalir dari kesimpulan diatas maka peneliti mengajukan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dinas Pariwisata yang merupakan pengelola sektor unggulan pemasukan PAD dengan mempedomani kebijakan perencanaan strategis Kabupaten Bangka, perlu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan Retribusi Daerah dengan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Bangka.
2. Perlu untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme petugas pariwisata melalui pelatihan-pelatihan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendidikan formal maupun non formal (pelatihan keterampilan) bidang kepariwisataan. Selanjutnya agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka, untuk tercapainya tujuan yang direncanakan.
3. Dengan mempelajari kondisi dan kontribusi sektor pariwisata yang fluktuatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka yang tergolong masih kecil sehingga perlu dilakukan peningkatan infrastruktur dan menentukan skala prioritas dalam pembangunan pariwisata untuk masa-masa mendatang.
4. Pendekatan pemecahan masalah dengan logika SWOT tidak dapat menuntaskan masalah pengembangan pariwisata, karena kelemahan yang dimiliki, pendekatan

yang lebih tepat adalah pendekatan komprehensif dan integral artinya memperhatikan semua aspek yang ada dalam menunjang/mempengaruhi pariwisata untuk dibangun dengan penekanan pada sektor/bagian yang paling sensitif dan mempengaruhi yang lain.

5. Perlu dibangun Badan Promosi Pariwisata oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan para pengusaha, pakar, peduli dan pekerja pariwisata, dengan membangun jaringan promosi secara sendiri-sendiri atau berkolaborasi dengan Badan-Badan Promosi Pariwisata yang ada ditingkat Nasional, Regional dan Global.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Anto Dajan (1991). *Pengantar Metode Statistik, Jilid II.*, Edisi 15 LP3ES, Jakarta.
- Assauri Sofyan (1992). *Manajemen Pemasaran Dasar Konsep dan Strategi*, Rajawali, Jakarta
- Arikunto, Suharsini (1998). *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta
- Didin Damanhuri (1996). *Otonomi Daerah dan Faktor-faktor yang mendorongnya* : Sinar Harapan, Jakarta
- (1996). *Ekonomi Politik Alternatif*; Sinar Harapan, Jakarta.
- Drucker & Stoner dalam Nitisemito, Alex S (1996). *Manajemen Personalia : Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Dunn, William N (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Efendy Sofyan (1992). *Good Governance*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Gibson (1993). *Organisasi, Prilaku, Struktur, Proses*, edisi kelima, cetakan keenam, Erlangga, Jakarta.
- Ginanjjar Kartasamita (1998), *Pembangunan Daerah*, CIDES, Jakarta
- Hasibuan (1997), Malayu, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Harefa, Andrias (2001). *Pembelajaran di Era Serba Otonomi*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Hariyoso (2002). *Pembaharuan Birokrasi dan Kebijakanaksanaan Publik, Peradaban*. Jakarta.

- Hasan, M. Iqbal (2002) *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ida, Laode (2002). *Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal dan Clean Government*. Cetakan I, November. Penerbit Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK), Jakarta.
- Imawan, Riswanda (2003) *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*. Dirjen Otda Depdagri, Jakarta.
- Josep Riwu Kaho (1997). MPA; *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*; PT. Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Juliana, A & Ilyas, Y (2004). *Manajemen Strategik Organisasi Publik (MAPU 5302); Panduan Belajar*, Jakarta Uiversitas Terbuka, Jakarta.
- LPPM Unisma Pemerintah Daerah Tingkat II; 2000; *Pendataan potensi PAD Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2000*.
- M. Arif Nasution dkk (2002), *Demokratisasi dan Problematika Otonomi Daerah*; Mandar Maju, Bandung
- Nawawi, Hadari (2003). *Manajemen Strategik Organisasi Nonprofit Bidang Pemerintahan: Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pearce II, J. A, & Robinson, Richard. B. (1997) . *Manajemen Strategik : Formulasi, Implementasi dan Pengendalian, Jilid Satu*. Binarupa Aksara., Jakarta.
- Prasetyo Irawan (1999). *Metode Penelitian* : Balai Pustaka, Jakarta.
- Rasyid, Rias (2001). *Administrasi Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Seminar Otonomi Daerah, Jakarta.
- Riyadi. Bratakusumah, Deddy Supriyady (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- Stanton, J., William (1986), Terjemahan Yohanes Lamarto, Prinsip Pemasaran, Jakarta : Erlangga, 1994. Mc Graw Hill Internasional Book Company, Sixth edition, Jakarta.
- Supranto J., M.A.(1990) Statistik Teori dan Aplikasi, Seri Manajemen. No. 80, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta.
- Sunu, Radio (1991), Konsep-konsep dan Fungsi Pemasaran, BPFE, Yogyakarta.
- Swastha Basu DH (1992), Manajemen Pemasaran Modern, Liberty, Yogyakarta
- Soejanto (1993), Pemerintah Daerah”, Gramedia, Jakarta
- Swastha Basu DH (1996), azas-azas Marketing, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Suwarsono (1996), Analisis Lingkungan Perusahaan, Sinar Harapan, Jakarta.
- Soepomo (1999), Otonomi Daerah, Gramedia, Jakarta.
- Salim Emil (2000). “*Otonomi Daerah dan Masalahnya*” dalam Bonar Simorangkir dkk *otonomi atau Federalisme: dampaknya terhadap Perekonomian*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.1
 Jumlah Penduduk, Persebaran Penduduk dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk
 serta Luas Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2003-2004

No	Kecamatan	Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Kepadatan Penduduk/ (Km')
		2003		2004			
		Penduduk Jiwa	Was Wil. Km ²	Penduduk Jiwa	Was Wil. (Km')		
1.	Sungailiat	53.227	-	56.137	146,38	1,37	384
2.	Belinyu	37.725	-	34.502	546,50	- 2,14	63
3.	Riau Silip	18.252	-	16.693	523,68	-2,13	32
4.	Bakam	12.203	-	12.871	488,10	1,37	26
5.	Pemali	15.412	-	16.255	127,87	1,37	127
6.	Merawang	21.854	-	22.989	205,72	1,30	112
7.	Mendo Barat	27.455	-	30.642	529,14	2,90	58
8.	Puding Besar	13.618	-	14.320	383,29	1,29	37
	J u m I a h	199.746	-	204.409	2.950,68	0,58	69

Sumber Data : Kantor BPS Kab. Bangka

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk, Rasio Sex dan Jumlah Rumah Tangga Tahun 2004

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Seks	Jumlah RT
1. Sungailiat	22.118	21.622	44.092	102,29	10.213
2. Belinyu	20.105	19.687	39.792	102,12	9.886
3. Riau Silip	8.034	7.650	15.684	105,10	3.582
4. Bakam	9.119	9.390	18.509	97,11	4.356
5. Pemali	13.484	13.402	26.886	100,61	5.953
6. Merawang	12.205	11.887	24.092	102,68	4.933
7. Mendo Barat	15.616	15.034	30.650	103,87	6,211
8. Puding Besar	7.228	7.070	14.298	102,23	3.081
Jumlah	107.909	105.742	213.651	102,05	48.215

Sumber Data : Kantor Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2004

Tabel 4.3
Jumlah Desa, Kelurahan dan Dusun Kabupaten Bangka
Tahun 2004

Kabupaten/ Kecamatan	Desa/Kelurahan			
	Desa Definitif	Kelurahan	Jumlah	Dusun
1. Sungailiat	1	6	7	3
2. Belinyu	5	3	8	16
3. Riau Silip	8	-	8	19
4. Bakam	9	-	9	13
5. Pemali	6	-	6	12
6. Merawang	10	-	10	34
7. Mendo Barat	13	-	13	25
8. Puding Besar	7	-	7	10
Jumlah	59	9	68	132

Sumber Data: Bagian Data Pemerintahan Setda Bangka

Tabel 4.4
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Penempatan
Kabupaten Bangka (Induk) Tahun 2004

Penempatan	Jumlah PNS				
	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1. Sungailiat	2	78	470	12	562
2. Belinyu	-	45	190	-	235
3. Riau Silip	7	63	101	3	174
4. Bakam	-	33	72	-	105
5. Pemali	1	33	101	-	135
6. Merawang	-	41	164	3	208
7. Mendo Barat	1	41	191	3	236
8. Puding Besar	1	23	81	2	207
Jumlah	12	357	1.370	23	1762

Sumber Data : Badan Kepegawaian Kabupaten Bangka

Tabel 4.5
Realisasi PAD Kabupaten Bangka Tahun 2004

NO	TAHUN	REALISASI PAD	PENINGKATAN/ PENURUNAN	KETERANGAN
1	2000	4.222.088.293	-	
2	2001	4.537.369.832	315.281.539	Naik/6,94%
3	2002	4.609.370.692	72.000.860	Naik/1,56%
4	2003	4.889.257.518	279.886.826	Naik/5,72%
5	2004	6.736.862.116	1.847.604.598	Naik/27,42%
Jumlah		24.994.948.451	2.514.773.823	Rata-rata naik 10,06%

Sumber Data : Bagian Keuangan Setda Bangka

Tabel 4.17
Keadaan Wisatawan Kabupaten Bangka
Tahun 2000 - 2004

Tahun	Jumlah Wisatawan		Jumlah
	Mancanegra	Nusantara	
2000	554	64.419	64.973
2001	610	70.961	71.471
2002	665	77.930	78.595
2003	516	76.100	76.616
2004	204	32.839	33.043

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka Tahun 2004

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.21
Perbandingan PAD dan APBD Kabupaten Bangka
Tahun 2000 - 2004

NO	JENIS PENDAPATAN/ ANGGARAN	PAD	APBD	PERSEN TASE
	TAHUN			
1	2000	4.222.088.293	67.758.075.726	6,00
2	2001	4.537.369.832	98.693.037.804	4,59
3	2002	4.609.370.692	94.415.619.290	4,88
4	2003	4.889.257.518	67.758.075.726	7,21
5	2004	6.736.862.116	98.675.037.804	6,82
	RATA-RATA	4.998.989.690	85.455.969.270	5,84

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, Kabupaten Bangka Tahun 2004

Tabel 4.22
Pajak Hotel dan Restoran
Tahun 2000 – 2004

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2000	115.000.000	119.033.207	103,51
2	2001	250.000.000	314.054.236	125,62
3	2002	300.000.000	329.102.807,60	109,70
4	2003	310.000.000	313.922.701	101,27
5	2004	262.500.000	337.557.676	128,59

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, Kabupaten Bangka Tahun 2004

Tabel 4.23
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Tahun 2000 – 2004

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2000	10.642.000	10.655.500	100,02
2	2001	11.000.000	19.375.550	113,83
3	2002	25.000.000	20.910.000	83,64
4	2003	25.000.000	17.700.000	70,80
5	2004	25.000.000	27.774.000	111,10

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, Kabupaten Bangka Tahun 2004

Tabel 4.24
Pajak Hiburan Tahun 2000 – 2004

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2000	18.000.000	123.918.069	132,18
2	2001	30.000.000	50.178.750	101,42
3	2002	50.000.000	50.718.750	101,44
4	2003	50.000.000	57.764.250	115,53
5	2004	55.000.000	65.213.600	118,57

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, Kabupaten Bangka Tahun 2004

KEPALA DINAS
YAN MEGAWANDI, SH, MSi
NIP. 440025816

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KABAG TATA USAHA
Ir. ZULKARNAIN IDRUS
Nip. 440026937

**KASUB.BAGIAN
PERENC. & PELAPORAN**
NUSLAH
NIP. 050040252

**KASUB. BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN**
SILVIA
NIP. 440021403

**Pit. KEPALA BIDANG
PROMOSI USAHA & BIMBINGAN WISATA**
Drs. ASEP SETIAWAN
NIP. 050066385

**KEPALA BIDANG
OBJEK DAN SARANA WISATA**
MURMAHUDI, SPDI
NIP. 131147895

**KEPALA BIDANG
SENI DAN BUDAYA**
ERMANILA HAMID
NIP. 440005911

**KEPALA SEKSI
PROMOSI WISATA**
Drs. GUNAWAN
NIP. 050065136

**KEPALA SEKSI
OBJEK WISATA**
Dra. AFRIDALIANA
NIP. 440028085

**KEPALA SEKSI
PENGEMBANGAN SENI & BUDAYA**
Kamaluddin Kirom, SH
NIP. 440016081

**KEPALA SEKSI
USAHA DAN BIMBINGAN WISATA**
M. EFFENDI
NIP. 380009302

**KEPALA SEKSI
SARANA DAN PRASARANA WISATA**
YAMMAAL S H HAREFA, A P
NIP. 010250714

**KEPALA SEKSI
ATRAKSI WISATA**
HANIPAH, SPd
NIP. 131016756

Sungailiat, 8 Oktober 2005

Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan
Budaya Kabupaten Bangka,

YAN MEGAWANDI, SH, MSi
Pembina Tingkat I
Nip. 440025816

UNIVERSITAS TERBUKA

**DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2005**

NO URUT	N A M A	N I P	GOL/ RUANG	T M T	JABATAN STRUKTURAL		M K		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			TGL LAHIR
					N A M A	T M T	TH	BLN	N A M A	TH	JML JAM	N A M A	LULUS TH	TK IJAZAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	YAN MEGAWANDI, SH. M.Si	440025816	IV - b	08/10/2004	KA. DINAS	05/02/2005	16		SPAMEN	2004		M.Si UGM JOGJA	2000	S2	30/01/1964
2	Ir. ZULKARNAIN IDRUS	440026937	IV - a	01/10/2001	KABAG. TU	05/02/2005			PIM II	2004		UNSRI	1989	S1	14/10/1963
3	ERMANILA HAMID, S. Pd	440005911	IV - a	01/10/2003	KABID SENI & BUDAYA	05/02/2005			SPAMA	2003		U T	2005	S1	21/03/1950
4	MURMAHUDI, S. Pd I	131147895	III - d	01/10/2002	KABID OBJEK & SARANA WISATA	05/02/2005			-	-		STAI	2003	S1	29/01/1962
5	Drs. ASEP SETIAWAN	050066385	III - c	01/04/2001	KABID PROMOSI USAHA DAN BIMBINGAN WISATA	07/01/2005			PIM III	2003		IAIN (DAKWAH)	1992	S1	04/05/1967
6	HANIPAH, S. Pd	131016756	III - d	01/10/2002	KASI ATRAKSI WISATA	05/02/2005			-			U T	2004	S1	05/07/1963
7	Drs. GUNAWAN	050065136	III - c	01/10/2001	KASI PROMOSI WISATA	05/02/2005			PIM III, IV	1999/2002		TARBIYAH (IPS)	1997	S1	22/10/1965
8	M. EFFENDI	380009302	III - c	01/10/2001	KASI USAHA DAN BIMBINGAN WISATA	05/02/2005			PIM IV	2004		S M A	1997	SLTA	18/08/1954
9	N U S L A H	050040252	III - c	01/10/2001	KASUBBAG PERENC. DAN PELAPORAN	05/02/2005			PIM IV	2003		SMEA	1981	SLTA	02/07/1961
10	YAMOWA'ALS. H. HAREFA. A.P	010250714	III - c	01/10/2003	KASI SARANA DAN PRASARANA WISATA	05/02/2005			PIM III	2005		STPDN	1997	S1	30/01/1975
11	Dra. AFRIDALIANA	440028085	III - c	01/10/2003	KASI OBJEK WISATA	05/02/2005			PIM IV	2003		IAIN (PAI)		S1	27/04/1970
12	SITI JANUARSIH, S. Ag	131759701	III - c	01/10/2004	PJ.KASI PENGEMBANGAN SENI & BUDAYA	05/02/2005			ADUM	2000		STAI	2000	S1	06/05/1964
13	S I L V I A	440021403	III - b	01/04/2004	PJ. KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	05/02/2005			ADUM	1998		SMEA	1975	SLTA	03/04/1956
14	Dra. WINDIATI	440028958	III - b	01/04/2004	PELAKSANA	05/02/2005			-	-		ISI	1990	S1	31/07/1964
15	T A R I P A N	050045275	III - b	01/10/2004	PELAKSANA	10/1/2005			PIM IV	2004		YOGYAKARTA S M A	1981	SLTA	9/7/1958

NO URUT	N A M A	N I P	GOL/ RUANG	T M T	JABATAN STRUKTURAL		M K		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			TGL LAHIR
					N A M A	T M T	TH	BLN	N A M A	TH	JML JAM	N A M A	LULUS TH	TK IJAZAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	ETTY KURNIATI	440021975	III - b	01/04/2005	PELAKSANA				ADUM	1999		S M A	2000	S2	30/01/1964
17	ARIE PRIMAJAYA, SE	P.10000239	III - a	01/12/2003	PELAKSANA							API (STIE)	1989	S1	14/10/1963
18	LOLY JULIA	440027168	III - a	01/04/2004	PELAKSANA				ADUM	1998		AKTRIPA- YAPARI	2005	S1	21/03/1950
19	INDRATA YUSAKA SURYA, SS	P.10000240	III - a	01/12/2003	PELAKSANA								2003	S1	29/01/1962
20	ZAINONI, S. Sos	440028306	III - a	01/04/2005	PELAKSANA							STIE LAN	1992	S1	04/05/1967
21	PAULUS SUPRIYANTO	700004245	II - d	01/03/2002	PELAKSANA							S M A	2004	S1	05/07/1963
22	ANGGRAITA NINGRUM, SE	440028836	II - c	01/04/2001	PELAKSANA							A P I	1997	S1	22/10/1965
23	SATTAR JULIUS, H. A.Md	P.10001915	II - c	01/04/2005	PELAKSANA							APT BANDUNG	1997	SLTA	18/08/1954
24	G U S T A R I	P.10001924	II - a	01/04/2005	PELAKSANA							SMEA NEGERI	1981	SLTA	02/07/1961

Sunggailiat . 24 Agustus 2005

Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan
Budaya Kabupaten Bangka,

dto

YAN MEGAWANDI, SH. M. Si
Pembina TK I
NIP 440025816

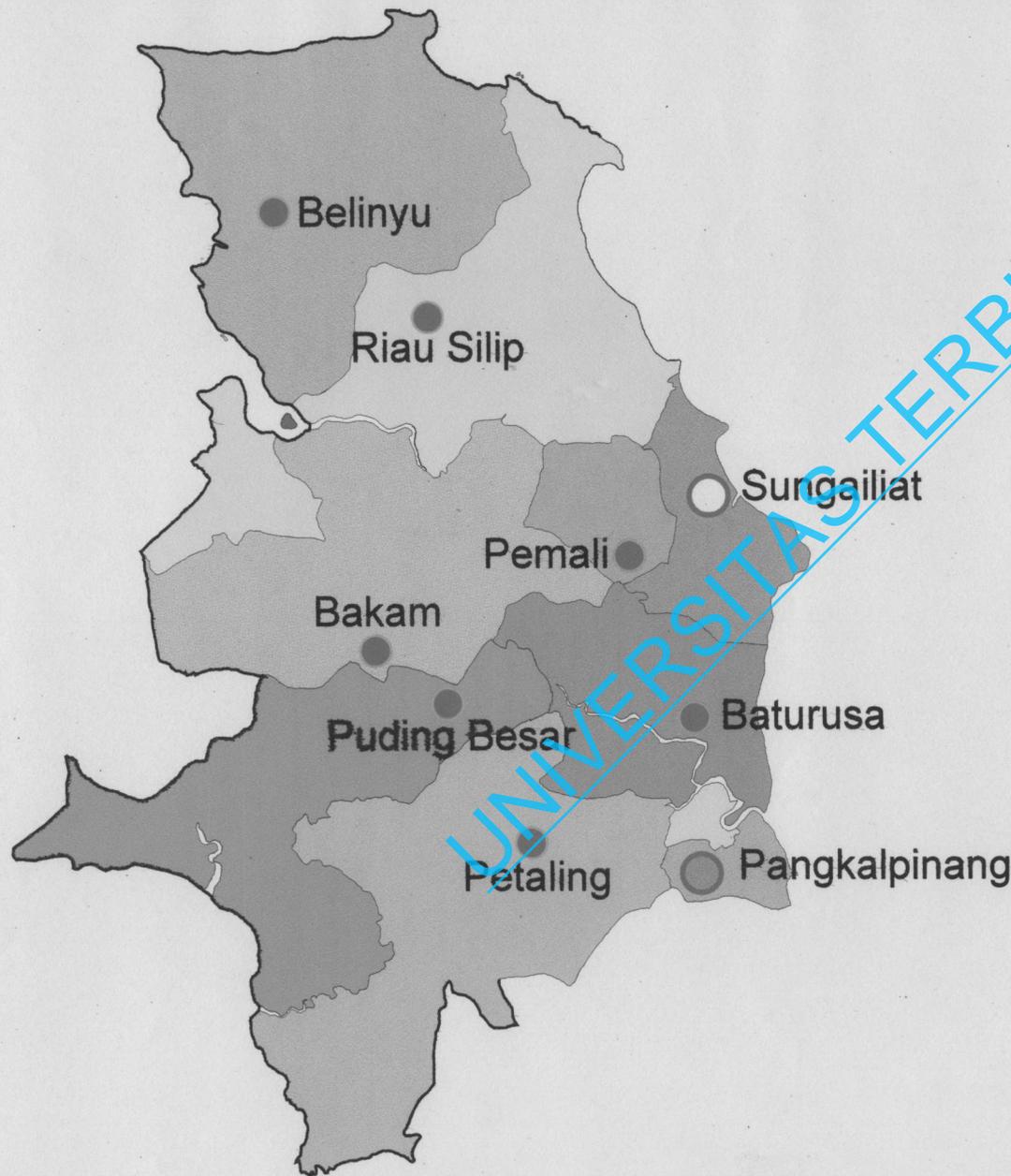
PETA KABUPATEN BANGKA

PETA WILAYAH ADMINISTRASI

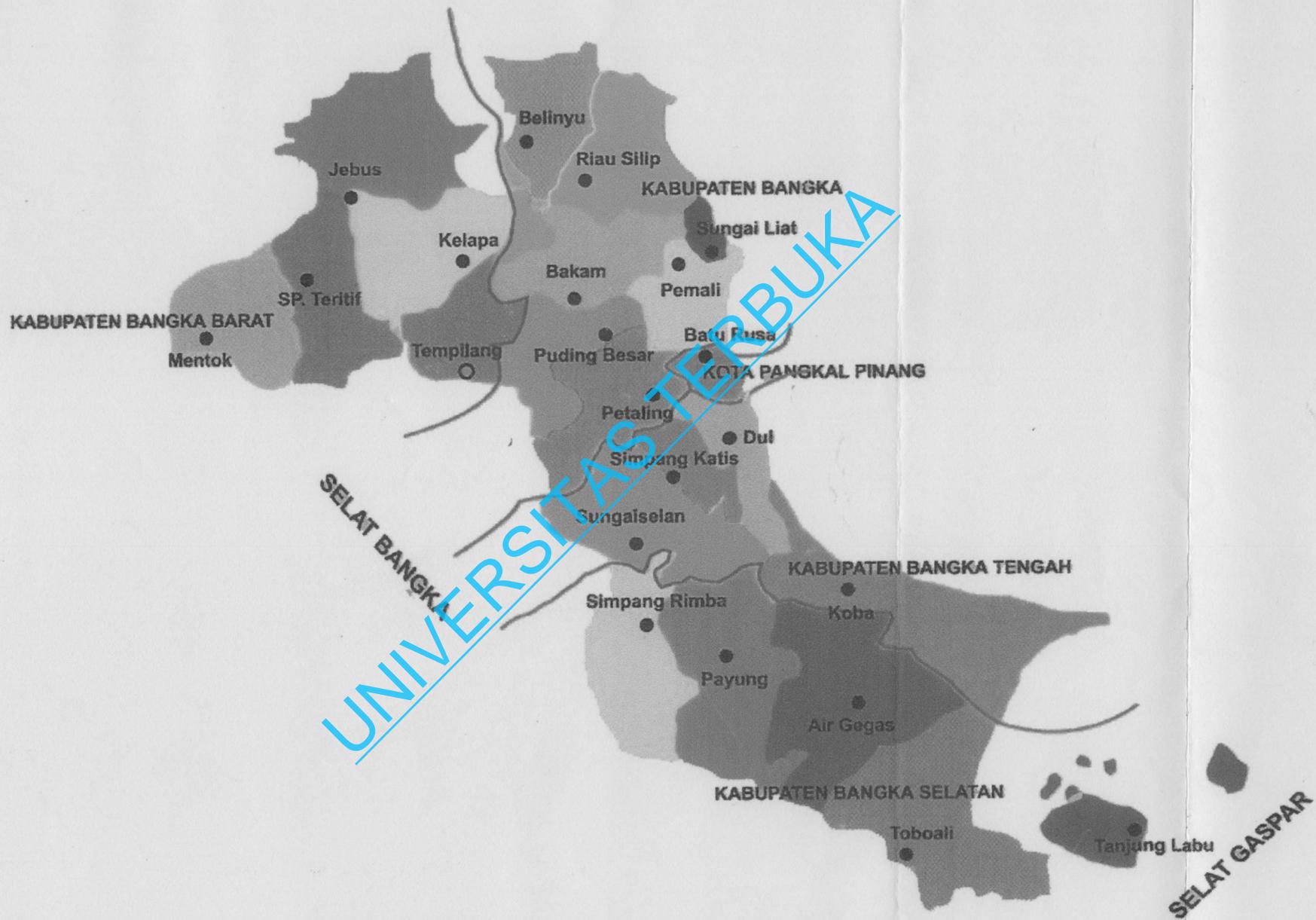
Batas Administrasi Kecamatan Per Kabupaten:

Kab. Bangka Induk

-  Bakam
-  Belinyu
-  Mendo Barat
-  Merawang
-  Pemali
-  Puding Besar
-  Riau Silip
-  Sungailiat



UNIVERSITAS TERBUKA



DAFTAR KUESIONER

Identitas Responden

Umur : Tahun

Pendidikan : a. Pasca Sarjana d. SLTA / SMA
 b. Sarjana / D IV e. SD / MI
 c. Sarjana Muda / D III

Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan

Pekerjaan : a. PNS c. Wiraswasta
 b. Buruh d. Karyawan Swasta

Petunjuk Cara Menjawab Kuesioner :

Pilihlah satu jawaban yang menurut anda paling tepat dengan cara memberi tanda silang (X) pada kolom jawaban :

- SS : Sangat Sesuai
- S : Sesuai
- KS : Kurang Sesuai
- TS : Tidak Sesuai
- STS : Sangat Tidak Sesuai

NO	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Pada umumnya pembangunan di Kabupaten Bangka apakah sudah sesuai dan berjalan sebagaimana mestinya khusus bidang Pariwisata ?					
2.	Menurut Anda, apakah pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bangka sesuai dengan yang diharapkan.					
3.	Apakah pembangunan obyek wisata sudah sesuai dengan adat istiadat masyarakat Bangka					
4.	Menurut Anda adanya hotel-hotel dilokasi obyek wisata apakah sesuai dengan keinginan anda dan masyarakat pada umunya.					
5.	Apakah prasarana yang mendukung pengembangan sektor pariwisata sudah sesuai seperti yang diharapkan ?					

NO	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
6.	Pelestarian budaya dan peninggalan sejarah yang merupakan asset wisata apakah sudah dilestarikan sesuai dengan perkembangan zaman.					
7.	Apakah dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pembangunan Pariwisata sudah sesuai untuk menjadi sumber pemasukan terhadap PAD					
8.	Apakah kontribusi sektor Pariwisata selama ini sudah sesuai dengan harapan anda sebagai pengelola sektor Pariwisata					
9.	Apakah perhatian pihak swasta/pengembang bidang pariwisata sudah sesuai sebagaimana diharapkan Pemerintah Daerah.					
10.	Apakah koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pembinaan sektor pariwisata sudah sesuai dengan rencana yang sudah diprogramkan.					
11.	Dalam rangka peningkatan "SDM" bidang pariwisata sudah dilakukan pendidikan formal dan nono formal apakah sudah sesuai dengan kebutuhan ?					
12.	Menurut Anda dengan adanya pihak swasta yang berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan, akomodasi, transportasi dan lain sebagainya apakah sudah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.					
13.	Apakah sumber pemasukan PAD dari sektor Pariwisata yang selama ini diberlakukan sudah sesuai dengan kehendak dan harapan Pemerintah Daerah					
14.	Dukungan masyarakat terhadap perkembangan pariwisata apakah sudah sesuai dan berjalan dengan baik.					
15.	Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan pemasukan sektor Pariwisata terhadap PAD maupun APBD menurut anda apakah sudah sesuai dilakukan selama ini.					
16.	Apakah pengembangan sektor pariwisata ini usaha untuk meningkatkan pemasukan bagi PAD sudah sesuai dengan program kerja/rencana strategik yang diharapkan.					

NO	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
17.	Apakah dengan menjadi sektor Pariwisata sebagai sektor andalan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah ?					
18.	Dengan adanya peningkatan pembangunan sarana transportasi darat, laut dan udara oleh pemerintah pusat dan daerah propinsi maupun daerah kabupaten/kota apakah sudah sesuai dengan harapan anda dan masyarakat pada umumnya ?					
19.	Menurut anda sektor pariwisata adalah sektor unggulan dan dapat dikembangkan hal ini sesuai dengan program pembangunan pariwisata jangka panjang.					
20.	Dinas Pariwisata sangat mendukung pembangunan sektor Pariwisata sesuai dengan harapan sebagai sektor andalan pasca timah.					

UNIVERSITAS TERBUKA

Rabu, Tanggal 05 Februari 2005 di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka.

- Mahasiswa : Berada di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Bangka.
- Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka, kehadiran saya menghadap Kepala Dinas Pendapatan ini adalah untuk mencari data penerimaan PAD dari sektor Pariwisata Kabupaten Bangka selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 2000 s.d. 2004 dalam rangka penulisan Tesis yang berjudul “ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGKA”
- Sebagai Mahasiswa Program Pasca Sarjana UT, saya mohon penjelasan Kepala Dinas tentang data yang saya perlukan tersebut.
- Ka. Dinas : Baiklah saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara di Kantor kami, dan saya menyambut baik dan mendukung semangat dan tekad Saudara menuntut ilmu di UT ini, saya persilahkan Saudara untuk mendapatkan data yang diperlukan dari Kantor kami ini, saya kira dapat menghubungi staf saya bidang pendataan dan penerimaan pajak/retribusi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah ini.
- Tetapi saat ini saya mohon maaf, tidak dapat mendampingi sampai selesai karena pukul 09.00 WIB ada rapat di Kantor Bupati Bangka. Dipersilahkan Saudara menghubungi Bapak Ediar, Bapak H. Hamzah dan Bapak-bapak lainnya, yang ada hubungannya dengan data yang Saudara perlukan.
- Mahasiswa : Baiklah, tidak apa-apa silahkan Bapak Kepala Dinas untuk rapat di Pemda, saya segera menemui staf yang ditunjuk tersebut dan terima kasih atas sambutan Bapak kepada saya, bahkan telah menyiapkan minuman (teh manis) ini.
- (Ka. Dinas memanggil 2 (dua) orang stafnya ke dalam ruangan kerja Ka. Dinas yaitu : Bpk K. Ediar dan Bpk H. Hamzah Z. dengan menjelaskan maksud kedatangan saya, kepada 2 (dua) orang staf tersebut. Ka. Dinaspun berangkat untuk rapat di Pemda sekitar pukul 08.45 WIB. Sehingga saya bersama 2 (dua) orang staf Dipenda, mencatat data yang diperlukan untuk penulisan Tesis tersebut.

- K. Ediar : Data tahun 2000 s.d. 2003 sudah berbentuk arsip dan akan dicari terlebih dulu, namun silahkan Bapak mencatat data yang ada ini terlebih dahulu yaitu data Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi dan Pajak Hiburan untuk tahun 2004, yang baru kami rangkap ini.
- H. Hamzah : Saya mencari arsip data tahun 2000 s.d. 2003 tersebut dan inilah datanya yang berkaitan dengan sektor pariwisata, serta besarnya kontribusi Pariwisata terhadap PAD maupun APBD Kabupaten Bangka dan data inipun dapat diperoleh di Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka karena setiap 3 (tiga) bulan laporan tersebut kami sampaikan ke Dinas Pariwisata dan datanya sama.
- Mahasiswa : Terima kasih Bapak telah membantu saya dan mendukung kegiatan ini, saya merasakan sangat terbantu sekali dengan data yang telah Bapak-bapak berikan, kiranya dapat memenuhi persyaratan dalam penulisan tesis ini.
- K. Ediar : Apabila data yang diperlukan masih terdapat kekurangan kami siap membantu dan memberikan data tersebut. Bila Bapak tidak sempat datang silahkan telpon saja ke Dinas/Kantor kami ini.

UNIVERSITAS TERBUKA

Senin, Tanggal 07 Februari 2005 di Kantor BAPPEDA Kabupaten Bangka.

Mahasiswa : Berada di Kantor BAPPEDA Kabupaten Bangka.

Yth. Bapak Kepala BAPPEDA, saya selaku Mahasiswa Program Pasca Sarjana UT, sekarang duduk pada semester IV Program Magister Administrasi Publik datang ke Kantor Bapak ini dalam rangka mencari data guna menyelesaikan penulisan Tesis yang merupakan kewajiban kami sebagai Mahasiswa pada program ini. Mohon maaf apabila kehadiran saya ini telah mengganggu tugas Bapak, selaku pimpinan di Kantor ini, namun karena pentingnya data yang saya perlukan seandainya Bapak ada tugas lain, maka saya diperkenankan untuk menghubungi staf Bapak, yang tugasnya membidangi permasalahan yang saya perlukan dalam penulisan tesis ini dan untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih telah menerima kehadiran saya di Kantor BAPPEDA ini.

Ka. Bappeda : Saya selaku Kepala BAPPEDA mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Kantor BAPPEDA ini, saya mendukung dan salut kepada saudara karena masih sanggup untuk mengikuti Pendidikan ini, saya persilakan Saudara mengambil data yang diperlukan untuk penulisan tesis tersebut. Saya kira Saudara dapat menghubungi Sdr. Surtam selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kantor ini, nanti beliau lah yang akan mengarahkan Saudara kepada staf kami yang membidangi data yang diperlukan. Kalau boleh saya tahu data tentang apa saja yang diperlukan dari Kantor kami ini?

Mahasiswa : Data yang diperlukan adalah mengenai perkembangan Pariwisata di Kabupaten Bangka ini, seperti : Buku Bangka Dalam Angka dan Buku PROPERDA (Program Perkembangan Daerah) kabupaten Bangka dari Tahun 2000 s.d. 2004 atau selama 5 (lima) tahun terakhir ini.

Ka. Bappeda : Mohon maaf, untuk Buku Bangka Dalam Angka dan Buku Properda tersebut sudah tidak ada dan kami tidak lagi menggunakan Buku-Buku tersebut. Tapi kami menggunakan RENSTRA atau Rencana Stretegis Pembangunan Kabupaten Bangka, karena inilah yang kami gunakan sampai saat ini.

Rabu, Tanggal 09 Februari 2005 di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka.

Mahasiswa : Hari ini berada di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka.

Diterima oleh Kabag. T U Dinas Pariwisata (Sdr. Ir. Zulkaranain Idrus) langsung menyampaikan maksud dan tujuan saya datang ke Kantor tersebut, sebagai Mahasiswa Program Pasca Sarjana UT, pada semester akhir ditugaskan untuk menyusun sebuah Tesis guna memenuhi syarat untuk mendapat gelar Magister Administrasi Publik yang mana Tesis yang saya susun berjudul “ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGKA”

Mohon maaf bila kehadiran saya disini telah mengganggu tugas Bapak di Kantor ini selaku pimpinan Dinas ini. Namun saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas sambutannya kepada saya, sehingga saya diperkenankan untuk mendapatkan data guna keperluan penulisan tesis saya dan saya berharap Bapak dapat mengarahkan saya kepada staf Bapak yang membidangi urusan yang berkaitan dengan penulisan Tesis saya ini, demikian maksud dan tujuan saya datang di Kantor Dinas Pariwisata ini.

Ka. Dinas : Sebagai Kepala Bagian Tata Usaha/merangkap PLH Kepala Dinas Pariwisata, sangat mendukung dan dengan tulus juga membantu Saudara dalam penulisan ini, saya persilakan Saudara dapat menghubungi staf-staf kami yang berkaitan langsung dengan data yang diperlukan seperti jumlah turis setiap tahunnya baik lokal, regional, nasional maupun manca negara dan lain-lain yang dianggap perlu. Kami juga mempersilakan kepada Saudara untuk melakukan penelitian terhadap dokumen, buku-buku dan Perda Kabupaten Bangka mengenai Dinas Pariwisata ini, Karena di Kantor kami ini tersedia sejumlah judul buku yang memang dipersiapkan untuk dipedomani dalam pengelolaan Dinas Pariwisata ini, utamanya untuk konsumsi staf kami sendiri dan juga bagi para tamu yang memerlukannya. Jadi data apa saja yang diperlukan dan jangka waktunya berapa tahun.

Mahasiswa : Terima kasih atas sambutan ini, dalam penulisan ini memerlukan data selama 5 (lima) tahun terakhir, yakni tahun 2000 s.d. 2004, bila tidak keberatan kami juga kiranya diberikan rencana kegiatan/program pengembangan Pariwisata Kabupaten Bangka ini selama 5 (lima) tahun terakhir.

- Ka. Dinas : Sebelum Saudara memulai pencatatan di Dinas kami ini, baiklah saya akan ceritakan sedikit tentang pengembangan Pariwisata Kabupaten Bangka, usaha yang telah Dinas lakukan adalah melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Bangka dan dalam Renstra tersebut banyak hal yang diajukan seperti promosi pariwisata, program mendatangkan turis khususnya mancanegara sekaligus Investor bidang pariwisata, namun kami akui usaha-usaha tersebut belum berhasil sebagaimana yang diharapkan, lebih-lebih sejak terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan dinegara kita ini, yang juga berimbas terhadap sektor pariwisata kita di Bangka ini. Padahal Bapak Bupati Bangka, telah menetapkan bahwa salah satu andalan pemasukan Daerah adalah dari sektor Pariwisata ini, terlihat didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun dianggarkan untuk pembangunan sektor pariwisata, dan pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata pun terus dibangun termasuk SDM dan sistem manajemennya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, untuk data silahkan hubungi staf kami, agar lebih memudahkan Saudara pinjam saja data kami tersebut untuk difotocopykan yang aslinya dapat dikembalikan sebagai arsip kami lagi.
- Mahasiswa : Terimakasih atas masukannya, ini sangat bermanfaat bagi penulisan Tesis ini lebih-lebih ditunjang dengan data yang berhubungan dengan penulisan ini. Saya langsung menemui staf Bapak yang membidangnya. Apabila nantinya setelah ini, mungkin masih ada kekurangan data, saya akan datang lagi ke Dinas ini.
- Ka. Dinas : Oh – ya, silahkan kami selalu siap membantu Saudara sehubungan dengan penulisan Tesis Saudara.
- Mahasiswa : Bila pada saatnya nanti, saya selesai mendapatkan data di Kantor ini dan Bapak ada tugas lain sehingga saya tidak dapat pamitan kepada Bapak, maka saat ini saya ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan data dari Kantor Bapak, kiranya berkenan menerima kata pamitan dan terima kasih atas penyambutan kepada saya selama berada di Kantor Dinas Pariwisata ini.

Ka. Dinas : Untuk pegawai, sudah memadai dengan jumlah 24 orang PNS, namun dari keprofesionalismenya memang perlu ditingkatkan lagi untuk saat-saat mendatang.

UNIVERSITAS TERBUKA

Mendatangi Kantor Dinas Pendidikan untuk menghimpun data dalam rangka penulisan Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka dengan Tesis berjudul, "ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGKA" dengan bidang Studi Magister Administrasi Publik.

Menghadap Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bangka setelah menyampaikan maksud dan tujuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional, dipersilahkan dan disambut dengan baik kehadiran saya di Dinas ini.

Kepala Dinas menyampaikan program pembangunan bidang Pendidikan kepada saya secara tegas dan luas, kemudian menyampaikan data tentang Pendidikan serta pertumbuhannya di Kabupaten Bangka, dengan membuktikan data pendidikan, sebagaimana yang diminta antara lain data penyebaran sarana Pendidikan dan keadaan murid/siswa pada tiap-tiap Kecamatan se Kabupaten Bangka.

Sebagai Pencari Data, saya mencatat semua data yang saya perlukan dan memasukan dalam bentuk tabel dan diagram bidang pendidikan ini. Untuk keperluan penulisan tesis saya dalam rangka mendapatkan gelar S2 bidang Administrasi Publik pada Universitas Terbuka ini.

Dengan sangat antusias dan mendukung sekali, Kepala Dinas membantu dan juga memintakan beberapa orang stafnya menyajikan data yang diperlukan dalam penulisan ini dan mempersilahkan saya untuk mengadakan semacam study literatur di Kantor Dinas Pendidikan pada ruang perpustakaan Kantor tersebut.

Setelah mendapatkan data yang diperlukan cukup memadai, tentunya saya pamit kepada Kepala Dinas dan para stafnya. Kepala Dinas menyatakan kepada saya, bila masih ada hal-hal tentang data yang diperlukan, beliau siap membantu untuk memberikan data tersebut. Kepala Dinas beserta staf selalu menerima kehadiran saya di Kantor ini.

Semua data yang didapatkan dari Dinas Pendidikan ini, memang saya sajikan dalam bentuk tabel yang sangat sederhana yang merupakan data pendukung penulisan tesis ini.